

**RASIONALITAS PARTAI NASDEM MENGUSUNG BASUKI TJAHAYA
PURNAMA SEBAGAI CALON GUBERNUR DALAM PILKADA DKI
JAKARTA 2017**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun oleh :

**KRESNA DEWANATA PHROSAKH
NIM : 201610270211017**

**MAGISTER SOSIOLOGI
DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Januari 2020**

**RASIONALITAS PARTAI NASDEM MENGUSUNG
BASUKI TJAHAYA PURNAMA SEBAGAI CALON
GUBERNUR DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017**

Diajukan oleh :

KRESNA DEWANATA PHROSAKH

201610270211017

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Selasa / 14 Januari 2020**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Dr. Rinikso Kartono, M.Si



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

KRESNA DEWANATA PHROSAKH

201610270211017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa / 14 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Sekretaris : Dr. Rinikso Kartono, M.Si

Penguji I : Dr. Wahyudi, M.Si

Penguji II : Dr. Asep Nurjaman, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KRESNA DEWANATA PHROSAKH

NIM : 201610270211017

Program Studi : Magister Sosiologi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **RASIONALITAS PARTAI NASDEM MENGUSUNG BASUKI TJAHAYA PURNAMA SEBAGAI CALON GUBERNUR DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,



KRESNA DEWANATA PHROSAKH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah walla hawla walla quwatta illah billah .

Akhirnya saya berhasil menuntaskan karya tesis ini sebagai bagian dari proses belajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Saya selalu berterima kasih pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya dan selalu berkhidmat atas tuntunan Nabi Besar Muhammad SAW. Tak lupa semua anggota keluarga terkhusus, Ayah- Rendra Kresna yang selalu menginspirasi saya, ibunda saya (alm) Erni Budi Wiji Lestari yang selalu berada didalam hati terdalam saya. Ibu Jajuk Rendra Kresna yang selalu menyemangati saya, Bapak Lamadji dengan segala nasehat dan arahannya, Bunda Anik Hartini dengan segala doa dan tirakatnya . Mbah Putri-Sulasmi dengan segala petuahnya. Teristimewa untuk istri, Aisiyah Khuriana tercinta yang selalu setia memberi dorongan dan sekaligus menjadi cambuk untuk saya segera menyelesaikan tesis ini. Beserta dua anugerah terindah dari Allah: Quinneira dan Qinansya yang memberikan senyuman nya untuk membuat saya tidak pernah lelah .

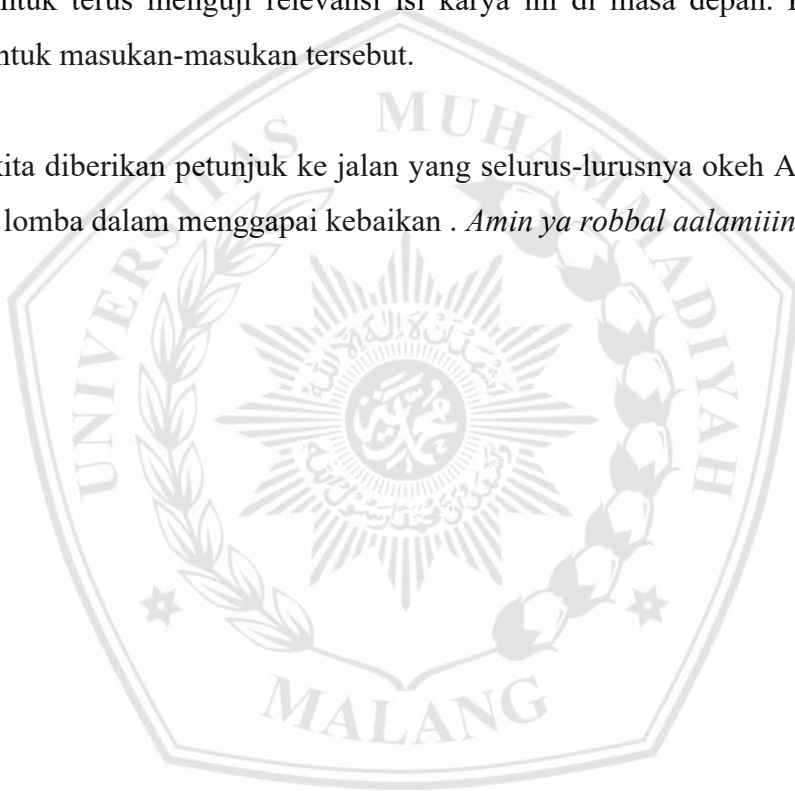
Pak Victory Pradhitama sebagai kakak, guru, mentor, musuh yang selalu menjadi pemicu pelatuk otak saya untuk berpikir dan merenungkan segala permasalahan yang kita hadapi dalam keseharian. Terima kasih atas tenaga dan pikiran yang selalu dicurahkan untuk membantu saya menyelesaikan tesis. Amarta Faza yang terhormat terima kasih telah menemani dan mengiringi semoga kita bisa lulus bersama juga Huda Sinatria. Terimakasih juga untuk teman-teman BMW, Tyok, Andre, Kentang, Tito Widiyanto, dan semua teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terakhir bukan berarti berkurang pentingnya, dengan seluruh rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak dosen pembimbing Bapak Dr. Rinikso Kartono atas segala saran dan bimbingannya selama masa kuliah hingga ujian tesis. Semoga saya selalu bisa menjaga saya motivasi dan nilai-nilai yang beliau ajarkan hingga di masa depan. Prof. Ishomuddin, hormat dan terimakasih tak terhingga, semoga ilmu yang diberikan kepada saya selalu akan saya ingat dan akan saya terapkan di kemudian hari. Kepada Dr. Wahyudi sebagi dosen penguji dan sebagai teman diskusi semoga sama sama bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dr Asep Nurjaman yang sangat *humble* dan sangat memberikan gambaran dan pandangan menarik tentang

politik lokal kita. Banyak pelajaran yang saya dapat dan semoga tetap bisa saling berdiskusi dalam berbagai hal.

Semua pihak yang mungkin belum saya sebutkan dalam lembaran ini, yang telah membantu saya merampungkan tesis ini, saya haturkan banyak terima kasih dan doa kepada *panjenengan* semua semoga tesis ini bisa berguna untuk bidang keilmuan sosial maupun politik dan berguna bagi masyarakat banyak. Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bidang ilmu social, tesis ini tentunya selalu terbuka terhadap berbagai dinamika sosial baru sehingga diskusi, saran dan bahkan kritikan merupakan hal penting untuk terus menguji relevansi isi karya ini di masa depan. Penulis selalu terbuka untuk masukan-masukan tersebut.

Semoga kita diberikan petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya okeh Allah agar bisa berlomba lomba dalam menggapai kebaikan . *Amin ya robbal aalamiin*.



Penulis

ABSTRAKSI

Kresna, 2020. *Rasionalitas Partai NasDem Mendukung Basuki Tjahaya Purnama Sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017*. Tesis Program Studi Magister Sosiologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing I: Prof. Dr.Ishomuddin, M.Si (0717045901) Pembimbing II: Rinikso Kartono, M.Si. (0718036501). Email: Dewanata@rocketmail.com

Kata Kunci: Keputusan, NasDem, Ahok, Rasional

Keputusan awal NasDem mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Sebagai pemilik jumlah kursi minoritas di DPRD DKI Jakarta, NasDem tidak menunggu terbentuk pola koalisi partai dominan, tetapi justru mengambil keputusan cepat dan tegas untuk mendukung Ahok sebagai petahana. Pilkada DKI Jakarta dipandang sangat strategis bagi partai politik karena status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menjadikan setiap momen politik yang terjadi merepresentasikan kontelasi kekuatan politik nasional. Selain itu, posisi politik Ahok juga sangat problematis sangat kontroversial di mata publik. Apresiasi tinggi terhadap kinerja dan prestasinya selama memimpin Jakarta diimbangi oleh antipati dari sejumlah kalangan terhadap profil minoritas dan kepribadiannya yang meledak-ledak. Asumsi teori pilihan rasional berangkat dari prinsip dasar ekonomi; optimasi, yang dapat diterjemahkan dalam ranah perilaku sebagai “memaksimalkan perolehan” atau “meminimalkan biaya”. Kesesuaian antara tujuan dan cara ini dikaji lewat pengamatan terhadap proses pembuatan keputusan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan pilihan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan aktor partai dan observasi lapangan yang dilengkapi kajian dokumen dan pustaka yang terkait dengan topik penelitian. Keputusan NasDem untuk mendukung Ahok akan dikaji dalam perspektif teori pilihan rasional untuk mengetahui proses dan faktor-faktor penentu dalam proses pembuatan keputusan tersebut.

ABSTRACT

Kresna, 2020. *The Rationality of NasDem Party to Support Basuki Tjahaya Purnama as a Candidate in 2017 Jakarta Gubernatorial Election*. Master Degree Thesis in Sociology Postgraduate Muhammadiyah University of Malang. First Adviser: Prof. Dr.Ishomuddin, M.Si (0717045901) Second Adviser: Rinikso Kartono, M.Si. (0718036501). Email: Dewanata@rocketmail.com

Keyword: Decision, NasDem, Ahok, Rational

Early decision from NasDem to support Ahok as a candidate in Jakarta Gubernatorial Election in 2017 has interesting scientific point of view. As a party with minority seats in DPRD Jakarta, NasDem did not waiting for a more permanent coalition from dominant party, NasDem made a quick and bold decision to support Ahok as an incumbent instead. Jakarta Gubernatorial Election has a strategic value for all political party, as capital of the state, every political events in Jakarta become the representation of national political constellation as well. In the other hands, Ahok also has some controversial points as candidate, highly public appreciation to his track record in bureaucratic reform coupled with negative respond from public because of his personal character as a bad tempered and his minority profile as a Christian and Chinese descendant. Rational choice theory based on basic assumption in economics; optimization, which can be translated into behavior as a “maximization gain” or “minimization cost”. The accordance between means and ends will be examined through observation to decision making process. This research will use qualitative approach and the data collection activities will be held in interview, field observation and document-literature research to complete the information. NasDem decision’s to support Ahok will be observe in perspective of this theory, to explaining the decision making process and those factors influence in the process.

DAFTAR ISI

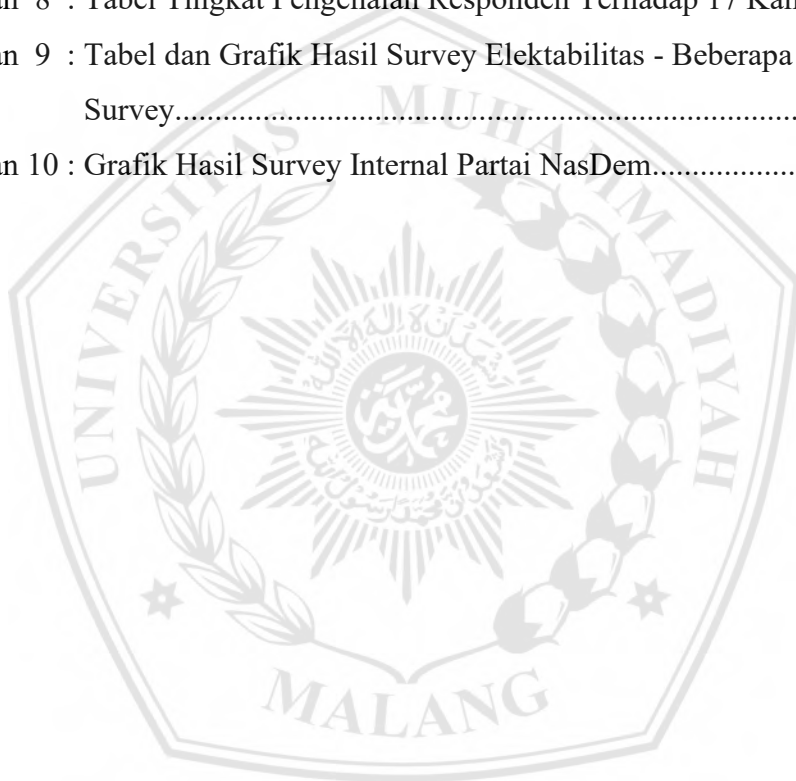
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
B. TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI	5
1. Penelitian Terdahulu: Partai Politik dalam Pilkada	5
2. Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>)	7
3. Model Pembuatan Keputusan Rasional	8
C. METODE PENELITIAN	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Subjek Penelitian	12
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	13
a. Wawancara dan Observasi	13
b. Dokumen Partai dan Sumber Pustaka	14
4. Teknik Analisa Data	15
D. HASIL PENELITIAN	16
1. Determinan dalam Pengambilan Keputusan Elektoral	16
a. Platform Ideologi Partai NasDem	16
b. Bappilu sebagai Mekanisme Inti Pengambilan Keputusan	19
2. Konstelasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017	19
a. Kiprah Politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)	22
b. Isu SARA Menjelang Pilkada DKI Jakarta	24
3. Model Pengambilan Keputusan Rasional Partai NasDem	25
a. NasDem <i>Play to Win</i>	25

b. Bappilu Epicentrum Pembuatan Keputusan Elektoral.....	27
c. Faktor-faktor Utama Pertimbangan Bappilu.....	30
d. Diskusi Teoritik.....	32
E.KESIMPULAN.....	34
RUJUKAN.....	35
LAMPIRAN.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Bagan Kerangka Penelitian.....	39
2. Lampiran 2 : Bagan Model Rasional Pembuatan Keputusan.....	40
3. Lampiran 3 : Bagan Partai NasDem sebagai Aktor Rasional.....	40
4. Lampiran 4 : Bagan Teoritik Pilihan Rasional dalam Keputusan Partai NasDem.....	41
5. Lampiran 5 : Bagan Mekanisme Pengambilan Keputusan Internal Partai NasDem.....	42
6. Lampiran 6 : Tabel Survey Elektabilitas Kandidat Pilgub DKI Jakarta 2017 – CSIS....	43
7. Lampiran 7 : Tabel Survey Popularitas Kandidat Pilgub DKI Jakarta 2017- CSIS.....	43
8. Lampiran 8 : Tabel Tingkat Pengenalan Responden Terhadap 17 Kandidat.....	44
9. Lampiran 9 : Tabel dan Grafik Hasil Survey Elektabilitas - Beberapa Lembaga Survey.....	45
10. Lampiran 10 : Grafik Hasil Survey Internal Partai NasDem.....	46



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keputusan Partai NasDem untuk mengusung calon petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pilkada Jakarta 2017 adalah keputusan yang menarik dan penting untuk dikaji secara ilmiah. Dari segi momentum, Partai NasDem adalah partai politik pertama yang menyatakan dukungannya terhadap Ahok ketika konstelasi politik DKI Jakarta menjelang Pilkada Gubernur 2017 masih berjalan dinamis dengan berbagai kemungkinan yang terbuka. Formasi koalisi masih sangat cair dan bursa nama-nama calon-pun masih mengembangkan begitu banyak nama, belum mengerucut pasti.

Konflik Basuki Tjahaya Purnama dengan DPRD dalam beberapa isu seperti reklamasi, penentuan APBD 2017 dan sebagainya juga membuat kedudukan Basuki Tjahaya Purnama lemah secara politik. Hampir seluruh partai politik, terutama partai besar pemilik kursi di DPRD Jakarta belum menunjukkan sikap dukungannya terhadap petahana. Walaupun sosok Basuki Tjahaya Purnama memiliki dukungan publik yang kuat namun bukan rahasia lagi bahwa karakter personalnya yang blak-blakan dan kebiasaannya menggunakan bahasa yang cenderung kasar turut menjadikan dia sosok yang kontroversial di mata sebagian pemilih Jakarta. Hal ini menjadi pertimbangan bagi sebagian partai politik pemilik kursi di DPRD Jakarta untuk menentukan dukungannya terhadap Basuki Tjahaya Purnama.

Ahok memiliki keunggulan dan kelemahan yang seimbang dalam diri dan karakter personalnya serta kinerjanya sebagai Gubernur selama kurang lebih 2 tahun menjabat. Pada kondisi normal, partai politik harus berhati-hati untuk menetapkan dukungan pada Ahok atau pada calon lain yang menantang Ahok karena faktor plus-minus ini. Banyak partai politik yang bersikap menunggu atau menahan arah dukungannya sambil terus mengamati dinamika politik Jakarta. Pada kasus ini, Partai NasDem mengambil keputusan yang tergolong berani untuk menyatakan diri mendukung Ahok terlebih dahulu bahkan sebelum partai-partai besar yang memiliki kursi dominan di DPRD DKI Jakarta seperti PDI-P dan PKS.

Dukungan Partai NasDem bahkan diberikan saat Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur *incumbent* (petahana) belum bisa memastikan dirinya akan maju melalui jalur partai politik atau lewat jalur independen. Moment dukungan NasDem

datang ketika Basuki Tjahaya Purnama telah menyatakan diri keluar dari Partai Gerindra yang memiliki saham politik besar terhadap pengajuannya sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Joko Widodo dari PDI-P pada Pilkada Jakarta 2012. Berdasarkan kalkulasi politik jumlah kursi, kepemilikan kursi NasDem di DPRD DKI Jakarta, 5 kursi (4.72%) tidak signifikan untuk mengusung Ahok sebagai calon gubernur dengan status petahan dari jalur partai, tetapi dengan tegas NasDem menyatakan sedari awal bahwa akan mendukung Ahok lewat jalur partai ataupun jalur independen.

Jakarta adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang masih dominan, apapun yang terjadi di Jakarta adalah penting dan menjadi perhatian secara nasional. Faktor pertama yang membuat Pilkada Jakarta menjadi penting karena sorotan media nasional, bahkan internasional, pada proses kontestasi ini merupakan pertarungan yang sangat strategis bagi citra seluruh partai politik yang terlibat. Kemenangan pada Pilkada Jakarta tentu menjadi barometer kekuatan politik nasional sekaligus “panggung yang sangat gemerlap” bagi partai atau koalisi partai politik pemenang untuk memamerkan kinerjanya terhadap rakyat.

Dalam konteks “panggung politik” ini bahkan Igor Dirgantara menyebutkan bahwa Pilkada Jakarta tidak hanya mengenai pertarungan kandidat-kandidat yang secara resmi diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik untuk maju berkampanye dan dipilih oleh rakyat tetapi juga merupakan “*proxy war*” dari tokoh-tokoh penting yang ada di belakang masing-masing kandidat. Pertarungan Pilkada Jakarta 2017 adalah refleksi dari persaingan pengaruh antara Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto dan Soesilo Bambang Yudhoyono yang merupakan tokoh-tokoh utama atau *King Maker* dalam peta politik nasional Indonesia saat ini¹. Hal ini terlihat dari dukungan langsung dan sikap *all out* dari tiga sosok penting ini dalam mendukung kandidatnya masing-masing.

¹ Dirgantara, Igor., *Jakarta Gubernatorial Election; Who Will be Eliminated*, Research Institute for European and American Studies, www.rieas.gr publication date; 14 January 2017

Gejala ini misalnya diperkuat dengan munculnya fenomena yang disebut sebagai “*Jokowi Precedence*”² yang merujuk pada karir politik Joko Widodo yang terus melaju menuju kursi presiden setelah memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Popularitas Joko Widodo semakin meroket ketika dia berhasil memenangkan Pilkada Jakarta dengan mengalahkan *incumbent* Fauzi Bowo yang didukung hampir seluruh partai politik. Kemenangan fenomenal di depan pemilih Jakarta yang heterogen dari suku, ras dan agama ini semakin meninggikan moral dan kepercayaan diri partai politik pendukungnya untuk kembali mengusung Joko Widodo sebagai kandidat kuat untuk pertarungan pemilihan presiden 2014. Kemenangan Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta ini juga dapat dikatakan fenomenal karena membalikkan ramalan dari berbagai lembaga survey yang justru mengunggulkan petahana dalam setiap survey perilaku pemilih yang dikeluarkan menjelang hari pemilihan suara. Fenomena “*Jokowi precedence*” inilah yang menambahkan poin strategis Pilkada Jakarta 2017 di mata partai-partai politik.

Partai NasDem menjadi salah satu pilar dari partai pendukung pemerintahan Jokowi. Sejarah bahkan mencatat bahwa Partai NasDem adalah partai politik yang pertama kali menyatakan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden, saat beliau baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menjadikan NasDem begitu identik dengan partai pendukung pemerintah. Partai NasDem yang menyatakan dukungannya terhadap calon petahana Basuki Tjahaya Purnama untuk maju kembali dalam Pilkada DKI 2017 patut diduga untuk mengulangi sukses yang sama ketika pasca Pilpres, Partai NasDem yang, walaupun tidak memiliki suara yang besar dalam Pileg 2014 yang baru saja selesai namun mendapatkan posisi politik strategis karena kecepatan pengambilan keputusannya untuk langsung mendukung Jokowi sebagai calon presiden bahkan ketika PDI-P sebagai Partai yang menaungi Jokowi masih menimbang peluang Jokowi dan nama-nama lain dari internal PDI-P.

Langkah ini juga bisa dipandang sebagai strategi untuk memperkuat platform ideologis Partai NasDem di ranah publik sebagai partai politik yang mendukung calon dalam kompetisi elektoral tanpa syarat atau ikatan hanya berpegang pada

² Chen, Jonathan & Satrio Dwi Cahyo, *Jakarta Gubernatorial Election; More Than Just Politics*, RSIS Publication, No.290, 29 November 2016, www.rsis.edu.sg, halaman 2

pertimbangan aspirasi masyarakat. *Platform* ini politik ini kemudian dikenal dengan jargon atau istilah “politik tanpa mahar” yang berkali-kali didengungkan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam berbagai kesempatan. Surya Paloh menegaskan bahwa politik tanpa mahar yang digagas oleh Partai NasDem sebagai bagian dari gerakan perubahan Restorasi Indonesia. Sejak awal partai NasDem berusaha menunjukkan implementasi komitmen itu dengan melakukan deklarasi dukungan terhadap Ahok melalui proses yang tidak berbelit-belit bahkan terkesan terburu-buru.

Perspektif teori pilihan rasional (*rational choice theory*) berasumsi bahwa aktor pengambil keputusan memiliki kesadaran penuh dan bekal informasi yang mencukupi sebelum melakukan pengambilan keputusan. Fenomena dukungan Partai NasDem yang terkesan dilakukan dengan cepat dengan proses yang singkat ini menjadi sangat menarik untuk dikaji, mengingat sebagai partai politik modern, Partai NasDem tentu memiliki pertimbangan rasional dalam proses pengambilan keputusannya.

Melalui penelitian ini, penulis ingin melakukan analisa tentang keputusan Partai NasDem untuk mendukung calon petahana basuki Tjahaya Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan latar belakang inilah menjadi sangat menarik untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dan pertimbangan rasional dan strategis Partai NasDem memutuskan untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka Penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan (*decision making process*) dalam Partai NasDem untuk menentukan dukungan politiknya pada calon petahana Basuki Tjahaya Purnama dalam Pilkada Jakarta 2017?
2. Apa faktor-faktor rasional yang melatar-belakangi keputusan dukungan tersebut?

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

1. Penelitian Terdahulu: Partai Politik dalam Pilkada

Pilkada langsung merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan semangat otonomi daerah (desentralisasi) dengan paradigma baru *good governance*. Dengan kepala daerah yang dipilih langsung maka demokrasi di tingkat lokal diharapkan memunculkan partisipasi lebih luas dari masyarakat lokal dan kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah daerahnya³. Partai politik mengemban peran yang sangat penting dan strategis, dalam ranah ideal (teoritis) partai politik berperan dalam sirkulasi elite menjaring calon-calon kepala daerah potensial dari figur tokoh-tokoh lokal. Walaupun kepentingan pragmatis untuk mencalonkan kader sendiri maupun mengirimkan kader dari pusat untuk dicalonkan juga kuat, bergantung pada mekanisme partai politik masing-masing.

Selain dalam lingkup *power exercise*, Pilkada juga memunculkan kewajiban bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik demokratis bagi rakyat. Arus utama pembangunan dengan isu lokal, perspektif lokal, dan sumberdaya lokal adalah salah satu tujuan “mendekatkan” proses politik Pilkada.

Salah satu kajian menarik yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Michael Buehler dan Paige Tan yang berjudul “*Party Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Election in Gowa, South Sulawesi Province*”⁴. Penelitian ini dipilih sebagai bahan kajian untuk menunjukkan bahwa pola hubungan partai dan kandidat dalam pilkada di daerah-daerah sangat berpengaruh membentuk pola pengambilan keputusan dalam menentukan kandidat yang diajukan oleh partai untuk berkompetisi. Walaupun penelitian ini dilakukan pada tahap awal pilkada di Indonesia, yaitu pada sekitar tahun 2005 tetapi peneliti beranggapan bahwa kajian ini masih relevan merepresentasikan situasi politik kepartaian kontemporer di Indonesia, terutama persoalan politik “mahar” atau pembayaran sejumlah uang dari kandidat yang berminat maju untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik pemilik kursi di parlemen daerah.

³ Aminah, Siti., Dr., “*Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*”, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 190

⁴ Buehler, Michael and Paige Tan, “*Party Candidate Relationship in Indonesian Local Politics; A Case Study of the 2005 Regional Election in Gowa, South Sulawesi Province*,”

Buehler dan Tan menggunakan kerangka berpikir tingkat institusionalisasi partai politik yang diperkenalkan oleh studi Scott Mainwaring dan Timothy Scully dalam *Building Democratic Institution; Party System in Latin America* dan karya Mainwaring sendiri yang berjudul *Rethinking Party System in the Third Wave of Democratization* kajian tentang institusionalisasi partai ini dianggap penting sebagai panduan untuk memahami dinamika partai politik kontemporer. Sedangkan institusionalisasi partai sendiri dalam kajian Mainwaring dan Scully dinilai dari beberapa faktor diantaranya adalah pada tingkat stabilitas sistem kompetisi dalam internal-partai, pengembangan akar partai dalam masyarakat, legitimasi partai dalam pemilihan umum untuk menentukan siapa yang memerintah, serta soliditas partai sebagai satu kesatuan organisasi

Partai politik dengan tingkat institusionalisasi yang rendah tidak dapat memproduksi pola kebijakan yang konsisten dalam merespon situasi politik atau kompetisi dengan partai lain dalam kerangka demokrasi. Partai politik seperti ini hanya akan berpindah dari satu pemilihan umum ke momen pemilihan umum lain berbasis pada pragmatisme dan kepentingan jangka pendek baik dalam menentukan strategi maupun dalam menentukan calon yang didukungnya untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

Sedangkan lemahnya akar partai dalam dinamika masyarakat menjadikan partai terisolasi dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tidak semata berfokus pada kandidat yang diinginkan dalam pemilihan umum semata tetapi lebih substansial dari itu juga terkait dengan kebijakan dan program. Partai politik sering bersikap pragmatis menjelang pemilihan umum dengan menggali aspirasi masyarakat hanya berbasis pada profil atau figur yang akan diajukan sebagai kandidat semata tetapi kurang merespon kehendak masyarakat terkait dengan tawaran program, visi-misi maupun rencana kebijakan sehingga pemilihan umum seringkali terjebak hanya pada perlombaan popularitas kandidat semata. Hal ini menjadikan masyarakat pemilih juga rentan dengan mudah berpindah dari satu partai politik ke partai politik lain.

Dalam penelitiannya, Buehler dan Tan menemukan bahwa hubungan antara partai politik dan kandidat dalam Pilkada lebih banyak ditentukan oleh hubungan personal orang-orang terkemuka di dalam organisasi partai politik. Hubungan antara kandidat calon dengan partai politik juga ditentukan oleh sejumlah uang yang

disetorkan oleh kandidat calon dari luar partai pada partai politik untuk mendapatkan rekomendasi partai tersebut maju sebagai calon dalam pilkada.

2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Asumsi dasar dari Teori Pilihan Rasional adalah pada proses pengambilan keputusan di level individu, analisa yang dilakukan selalu didasarkan pada pendekatan ekonomi mikro⁵. Analogi sederhana untuk ini adalah bahwa setiap orang ingin membeli dengan harga serendah mungkin dan menjual dengan harga setinggi-tingginya untuk memaksimalkan perolehan yang didapatkan. Dalam bahasa yang lebih teoritis dinyatakan bahwa “*the rational decision maker chooses from among a set of alternatives, the alternative that maximize utility*”.⁶ Definisi pilihan rasional pada dasarnya adalah bahwa proses untuk menentukan keputusan berdasarkan identifikasi pilihan-pilihan yang tersedia selalu didasarkan pada kriteria atau prinsip dasar yang bersifat konsisten. Salah satu kriteria atau prinsip dasar terpenting adalah upaya untuk melakukan optimalisasi nilai dari setiap pilihan yang diambil atau diputuskan.

Karakter utama dari teori Pilihan Rasional yang membedakannya dengan teori sosiologi yang lainnya sebenarnya dapat dirangkum dalam satu kata yaitu; *optimization*. Jadi aktor dalam memenuhi asumsi bertindak rasional tadi selalu berorientasi pada *optimization* dalam berbagai varian model, terkadang aktor melakukan *maximizing utility* atau *minimizing cost*, bisa pula menggunakan cara lain dengan prinsip utama *optimization* tersebut⁷. proses perhitungan secara spesifik terhadap kesesuaian antara tujuan dengan pilihan-pilihan tindakan dengan prinsip panduan mencapai hasil terbaik inilah yang membedakan teori Pilihan Rasional dengan teori-teori lain dalam sosiologi yang terkadang memusatkan perhatiannya pada tindakan sebagai sesuatu yang *reasonable* (beralasan) atau *understandable* (dapat dipahami).

⁵ Levine, Jonathan & Paul Migrom, *Introduction to Choice Theory*, dalam <https://web.stanford.edu/~jdlevin/cv.pdf> halaman 1

⁶ Mintz, Alex & Karl de Rouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge University Press, 2010, halaman 7

⁷ Coleman, James and Thomas J. Fararo, (ed). *Rational Choice Theory: Advocacy and Critique*, SAGE Publications, London, 1992, pp: , *Introduction*.

Proses pilihan rasional kemudian juga dapat dilakukan melalui konsep *maximizing utility function* sebagai panduan dasar. Konsep *maximizing utility function* adalah muncul menjadi kajian penting dalam ilmu sosial sejak awal abad ke 19. Para filsuf utilitarian pada masa itu berusaha mengembangkan kriteria objektif bagi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan organisasi. Kebijakan atau keputusan pemerintah didasarkan pada nilai universal yaitu “*greatest good for the greatest number*” maka permasalahan yang muncul adalah adanya perbandingan tentang pilihan beberapa kebijakan atau keputusan yang paling mendekati pada nilai ideal tersebut⁸. Dalam konteks pengambilan keputusan dalam organisasi, model aktor rasional ini sangat direkomendasikan. Model rasional dapat berlaku efektif untuk pengambilan keputusan karena model ini tetap terbuka terhadap informasi baru tetapi juga sekaligus memiliki mekanisme untuk mengolah dan menyederhanakan informasi tersebut sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Model Pembuatan Keputusan Rasional (*Rational Model of Decision Making*)

Pada awal abad ke 19, menurut Maurice Duverger, pembicaraan tentang partai politik didominasi studi yang mengacu pada jenis pemikiran atau ideologi yang mendasarinya, bukan tentang orang-orang atau tokoh yang ada di dalamnya apalagi mekanisme organisasi yang berjalan di dalamnya. Pada era berikutnya, ketika pengaruh Karl Marx dan Lenin menguat, pembahasan tentang partai politik bergeser pada kelas sosial yang berusaha direpresentasikannya. Pada 1920an hingga 1940an di Amerika Serikat, kajian ilmu politik melihat partai politik lebih banyak pada struktur partai-partai politik terutama pada hal yang disebut sebagai mesin penggerak partai (*party machinery*).

Pada perkembangannya kemudian kajian tentang partai politik justru lebih banyak membahas tentang proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang berkaitan dengan strategi atau *counter* strategi mereka dalam merespon situasi politik dalam kerangka kompetisi memperebutkan kekuasaan. Dengan kata lain, kajian

⁸ Jonathan Levine & Paul Migrom, *Introduction to Choice Theory*, dalam <https://web.stanford.edu/~jdlevin/cv.pdf> halaman 1

tentang kepartaian kontemporer lebih terikat pada “apa yang dilakukan oleh partai” daripada pada topik “apa dan bagaimana partai itu sebenarnya”. Kajian lebih mengarah pada strategi yang digunakan oleh partai dalam meraih kekuasaan atau turut ambil bagian penyelenggaraan kekuasaan bukan lagi pada organisasinya⁹.

Menentukan pilihan dan membuat keputusan adalah bagian dari aktivitas keseharian manusia baik sebagai individu maupun dalam kelompok/organisasi. Keputusan tersebut bisa dalam ruang lingkup individu maupun berdampak luas pada beberapa orang, suatu daerah bahkan Negara bergantung pada posisi pembuat keputusan dan konteks pembuatan keputusan yang dilakukan¹⁰. Pada realitasnya, proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh terlalu banyak faktor, baik internal maupun lingkungan dan situasi eksternal. Hal ini membuat kajian *Decision Making Proses* berkembang dengan berbagai pendekatan yang datang dari berbagai disiplin ilmu. Secara umum proses pembuatan keputusan dijelaskan dalam tahapan sebagaimana berikut; 1. Identifikasi permasalahan, 2. Pencarian alternative keputusan, 3. Seleksi alternatif keputusan dan 4. Eksekusi keputusan.¹¹

Secara lebih sederhana, Uzonwanne menegaskan karakteristik utama dari proses pembuatan keputusan rasional yang dibedakan jelas dengan pembuatan keputusan yang bersifat intuitif yaitu sebagai “proses seleksi ketat terhadap pilihan-pilihan yang tersedia”. Model pengambilan keputusan rasional dibedakan dengan pengambilan keputusan yang intuitif dalam aspek proses seleksi pilihan-pilihan dan pertimbangan terhadap situasi yang bersifat objektif. Evaluasi terhadap pilihan-pilihan merupakan bentuk penyesuaian antara tujuan dengan cara untuk mendapatkan kesesuaian yang bersifat maksimal.¹²

Kajian *Decision Making* dalam sosiologi berkembang dalam khasanah beberapa pemikiran besar seperti Max Weber yang berusaha mengetengahkan pentingnya dasar penjelasan sosiologis dalam model rasional ketika mengkaji proses

⁹ Duverger, Maurice., “*Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*” (terj.), Bina Aksara, Jogjakarta, 1984, halaman 5.

¹⁰ Polic, Marko, *Decision Making; Between Rationality and Reality*, Interdisciplinary Description of Complex System 7(2), 78-89, 2009, halaman 2, introduction.

¹¹ Mintz, Alex & Karl de Rouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge University Press, 2010, halaman 6

¹² Unzonwanne, Francis., “Rational Model of Decision Making”, publication at: <https://www.researchgate.net/publication/311761486>, chapter January 2016, pp 2

pembuatan keputusan¹³. Max Weber berpendapat bahwa teori pilihan rasional dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku individual dalam lingkungannya sepanjang kita memahami motif atau dorongan yang mendasari perilaku seseorang. Model Max Weber ini dikenal sebagai *Thick Model of Rational Choice* yang diartikan sebagai pemahaman yang lebih luas terhadap aspek rasional dalam tindakan manusia. Model Weber memasukkan *beliefs* dan *values* sebagai bagian dari motivasi dalam perilaku manusia¹⁴. Model ini diperlawankan dengan *Thin Model of Rational Choice* yang hanya terfokus pada aspek subjektif dari motivasi individu. Apa yang dimaksud sebagai teori pilihan rasional secara murni adalah proses pengambilan keputusan yang didasari oleh perhitungan matematis atau mikroekonomik murni dan bebas nilai¹⁵.

Penggunaan paradigma pilihan rasional yang meluas dalam sosiologi juga menimbulkan sikap skeptis dari sebagian sosiolog. Kritisisme bersumber pada anggapan bahwa asumsi pendekatan rasional yang cenderung matematis seringkali tidak berhubungan langsung dengan realitas. Pada penelitian sosiologis yang lebih luas terhadap fenomena sosial pengambilan keputusan ternyata seringkali individu bertindak secara emosional, impulsif atau sepenuhnya tanpa sadar dipandu oleh kebiasaan atau nilai-nilai sosial dari luar dirinya.¹⁶

Teori klasik dalam kajian organisasi menekankan proses pembuatan keputusan sebagai proses rasional berdasarkan ekspektasi (harapan) sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirancang sebelumnya¹⁷. Unit-unit atau bagian-bagian dari organisasi bertindak sebagai instrumen yang menyediakan informasi dan melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan yang muncul dalam proses pengambilan keputusan. Asumsi umum yang berlaku dalam pengambilan keputusan organisasional adalah seluruh anggota organisasi menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan deskripsi tugas yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu seluruh anggota atau unit-unit organisasi juga

¹³ Hedstrom, Peter & Charlotta Stern, *Rational Choice and Sociology*, Annu. Rev. Sociol. 1997. 23: 191-214

¹⁴ Hechter, Michael & Satoshi Kanazawa, *Sociological Rational Choice Theory*, Annual Review Sociology, 1997, 23: 191-214

¹⁵ Scott, John., *Rational Choice Theory* dalam G Browning, A. Halcli dan F. Webster (ed), *Understanding Contemporary Society: Theory of the Present*, Sage Publication, 2000, halaman 3

¹⁶ Hechter, Michael & Satoshi Kanazawa, *Sociological Rational Choice Theory*, Annual Review Sociology, 1997, 23: 191-214

¹⁷ Stuart M. Dillon, *Descriptive Decision Making: Comparing Theory with Practice*,

bertindak berdasarkan rasionalitas organisasi bukan kepentingan atau perspektif individual mereka.

Penempatan Partai NasDem sebagai aktor dalam pembuatan keputusan rasional dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Coleman sebagaimana berikut ini:

“Rational choice theorists have incorporated collective action into their theories by requiring that the actions of groups and organisations be reducible to statements about the actions of individuals. Trades unions, political parties, business enterprises, and other organisations may, then, all figure as actors in rational choice theories. Whenever it is possible to demonstrate the existence of a decision-making apparatus through which individual intentions are aggregated and an agreed policy formulated, it is legitimate to speak of collective actors (Hindess 1988, Cook et al 1990).”¹⁸

Fokus utama penelitian ini, berdasarkan argument di atas, adalah untuk menunjukkan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan yang dijalankan oleh *apparatus* partai dapat memenuhi kepentingan sekaligus tujuan bersama individu yang terlibat dalam proses yang telah disepakati.

Pada penelitian ini fokus kajian yang hendak dibahas adalah keputusan Partai NasDem untuk mendukung calon petahana Basuki Tjahaya Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan partai politik dalam menentukan tujuan dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan penggambaran Maurice Duverger dalam tahapan perkembangan fokus kajian partai politik dalam khasanah kajian ilmu politik.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dimaksudkan sebagai penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang merupakan perpaduan dari metode wawancara dan penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui

¹⁸ Scott, John., *Rational Choice Theory* dalam G Browning, A. Halcli dan F. Webster (ed), *Understanding Contemporary Society: Theory of the Present*, Sage Publication, 2000, halaman 7

prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lain¹⁹. Penelitian kualitatif biasanya mengambil topik tentang riwayat hidup, perilaku individu atau organisasi, pergerakan sosial, perubahan sosial maupun hubungan timbal-balik (interaksi) sosial. Namun perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif pada dasarnya adalah pada “bagaimana menyikapi data” atau bagaimana peneliti melakukan analisa terhadap data.

Penjelasannya sebagai berikut, misalkan data suatu penelitian didapatkan melalui wawancara langsung, maka ada kecenderungan akademisi menganggap bahwa teknik ini lebih dekat dengan penelitian kualitatif. Hal ini bisa menjadi berkebalikan ketika peneliti pada bagian akhir analisa data peneliti justru mulai menandai data yang dimilikinya dengan pola-pola tertentu sehingga bisa dihitung atau dikuantifikasi sebagai dasar pengambilan dasar kesimpulan. “Gaya” penelitian kualitatif berusaha merekonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat proses, peristiwa dan otentisitas.²⁰

2. Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengetahui proses pengambilan keputusan baku/formal yang bersifat administratif di internal Partai NasDem dalam penentuan kebijakan elektoral dalam Pilkada. Pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan elektoral inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisa faktor-faktor rasional yang menjadi pertimbangan dalam mekanisme pengambilan keputusan Partai NasDem terkait keputusannya untuk mendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Berdasarkan kebutuhan informasi tersebut maka, informan atau subjek dalam penelitian ini ditentukan. Subjek atau informan utama dalam penelitian ini adalah pengurus partai yang terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan atau diperkirakan memiliki akses informasi dalam proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup internal partai NasDem baik dalam struktur DPP (Dewan Pengurus

¹⁹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, “Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data” (Cet. IV), Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013

²⁰ Gumilar Rusliwa Soemantri, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Makara, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.9 No2, Desember 2005,

Pusat) maupun struktur di bawahnya atau bahkan organ-organ khusus Partai NasDem yang dipandang memiliki keterkaitan dengan topik utama penelitian ini.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memadukan teknik pengumpulan data primer secara langsung melalui berbagai aktivitas serta mencari data sekunder melalui berbagai sumber informasi yang dianggap mampu membantu menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) yang telah disusun sebagai dasar kegiatan penelitian ini secara keseluruhan.

a. Wawancara dan Observasi

Koentjaraningrat mendefinisikan wawancara sebagai metode penelitian sebagaimana berikut;

“Metode wawancara atau interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.”²¹

Dalam penjelasan Koentjaraningrat ini kita dapat memahami bahwa wawancara sebagai sebuah metode penelitian tentu berbeda dengan percakapan biasa. Metode wawancara menekankan adanya strategi dan persiapan-persiapan tertentu yang membedakan wawancara dengan percakapan biasa. Strategi dan persiapan yang dilakukan meliputi banyak hal dari mulai menyusun daftar orang yang akan diwawancarai hingga menyusun daftar pertanyaan dan alternatifnya untuk mengarahkan wawancara untuk memperoleh informasi yang berguna bagi penelitian.

Koentjaraningrat juga membedakan wawancara menjadi dua macam model. Model pertama adalah wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang pendapat atau pendirian seseorang berdasarkan penguasaannya atau informasi yang dimilikinya terhadap suatu masalah yang berhubungan topik penelitian. Dalam model wawancara seperti ini sasaran atau orang yang diwawancarai disebut sebagai *informan*. Model

²¹ Koentjaraningrat, “Metode Wawancara” dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1977.

kedua adalah orang yang sengaja diwawancarai untuk dicatat pendapatnya dan dibandingkan dengan pendapat orang lain. Dalam model wawancara seperti ini orang yang diwawancarai disebut dengan *responden*.

Wawancara dan tanya jawab akan dilakukan terhadap beberapa tokoh di internal Partai NasDem yang mengetahui dan terlibat langsung dalam setiap fase dan proses pengambilan keputusan Partai NasDem untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Asumsi dasar terhadap Partai NasDem sebagai satu kesatuan atau unit tunggal pembuat keputusan menjadikan peneliti merancang atau menyusun sasaran permintaan wawancara pada beberapa tokoh Partai NasDem sesuai dengan posisi dan kapasitasnya dalam struktur Partai NasDem dalam kurun waktu proses pembuatan keputusan. Sedangkan observasi adalah penggunaan instrument inderawi peneliti selama kehadirannya dalam penelitian untuk mengamati berbagai fenomena sosial yang terjadi.

b. Dokumen Partai dan Sumber Pustaka

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai bahan dan dokumen tulis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian ini. Berbagai sumber informasi, baik dalam bentuk materi bacaan, atau dokumen yang dipilih dengan hati-hati berdasarkan pertimbangan kualifikasi dan relevansinya dengan topik penelitian. Seleksi ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas kualitas data dan informasi yang akan dipergunakan oleh peneliti sebagai bahan analisa penelitian ini.

Kajian pustaka yang akan dipergunakan sebagai data dalam penelitian ini mencakup dua bagian materi. Bagian pertama terkait dengan profil Partai NasDem sebagai partai politik yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Data dan informasi tentang Partai NasDem terutama terkait dengan sejarah pendirian, manifesto dan berbagai informasi lain yang bersifat internal yang dapat digali lewat dokumen-dokumen partai, buku-buku terbitan partai yang juga beredar secara internal maupun lewat bahan cetak lain termasuk dokumentasi materi rapat.

Bagian kedua dari data dan informasi pustaka yang berkaitan dengan proses kandidasi Basuki Tjahaya Purnama dan keterkaitannya dengan dinamika Partai NasDem selama periode atau tahapan kandidasi tersebut. Bagian kedua ini akan lebih

banyak bergantung pada informasi yang disajikan oleh media massa dan beredar secara luas. Data dan informasi yang lebih bersifat dinamis ini digunakan untuk menunjang informasi yang akan didapatkan dari hasil wawancara karena penelitian ini, dan wawancara yang akan dilakukan bersifat pasca-kejadian, jadi sangat terbuka kemungkinan-kemungkinan narasumber atau informan wawancara tidak mampu mengingat detail-detail informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, asumsi teori menjadi penuntun utama dalam pencarian data. Hasil pengujian terhadap asumsi-asumsi teoritis dengan informasi temuan di lapangan ini menjadi hasil utama dari penelitian. Model penggunaan teori sebagai panduan utama penelitian ini lazim dilakukan dalam penelitian deskriptif kualitatif.²² Data dan informasi yang telah terkumpul dari aktivitas penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan teori dan pendekatan yang telah dipilih dan dinyatakan dalam bagian penulisan teori di atas. Pada bagian pertama peneliti melakukan kajian pustaka untuk mencari informasi yang akan disusun dalam bentuk deksripsi tentang beberapa hal yang menjadi latar belakang topik utama penelitian yaitu tentang Partai NasDem dan Pilkada DKI Jakarta.

Kajian pustaka terhadap Partai NasDem dilakukan melalui berbagai buku, website, berita media massa, dokumen KPU dan dokumen AD/ART serta manifesto Partai NasDem. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sedekat mungkin tipologi Partai NasDem dari mulai sejarah berdirinya partai, dinamika, ideologi dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Partai NasDem. Analisa bahan kajian tentang Partai NasDem ini terutama akan dipusatkan pada mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku dalam internal Partai NasDem, terutama berkaitan dengan bagaimana mesin partai bekerja ketika menghadapi Pilkada.

Hasil wawancara pada beberapa tokoh-tokoh partai digunakan untuk merekonstruksi ulang proses pembuatan keputusan dalam internal Partai NasDem ketika melakukan proses pengolahan informasi dan mencermati berbagai pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017. Upaya

²² Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, halaman 4

rekonstruksi terhadap proses dan tahapan pengambilan keputusan ini juga tidak hanya mengandalkan ingatan para pelaku yang berperan sebagai aktor yang sedang menjalankan mekanisme partai dalam menentukan kandidat tetapi nantinya juga dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang dapat membantu untuk menggali informasi yang lebih akurat. Berita media massa terutama dari sumber media online yang kredibel juga sangat membantu untuk mendapatkan data-data mengenai momen-momen penting pengambilan keputusan dengan lebih akurat.

D. HASIL PENELITIAN

1. Determinan dalam Pembuatan Keputusan Elektoral

a. Platform Ideologi Partai NasDem: Gerakan Perubahan, Restorasi Indonesia dan Politik Tanpa Mahar

Partai politik di Indonesia pada dasarnya tidak memiliki perbedaan ideologi yang mencolok seperti partai-partai di luar negeri. Semua partai politik di Indonesia menempatkan Pancasila sebagai azas dasarnya. Hal ini juga terjadi pada Partai NasDem yang menyatakan berazaskan Pancasila dalam Pasal 2, Anggaran Dasar mereka²³. Visi partai dinyatakan sebagai “Indonesia yang merdeka sebagai Negara bangsa, berdaulat secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya”.²⁴

Pada dasarnya ada dua faktor utama yang menjadikan Partai NasDem diminati oleh banyak tokoh untuk bergabung dan berjuang bersama walaupun notabene status Partai NasDem dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 adalah partai baru, bahkan satu-satunya partai politik baru, yang harus bersaing dengan partai-partai lain yang telah mapan, telah banyak di kenal di kalangan akar-rumput, memiliki basis massa pemilih dan berpengalaman dalam strategi pemilihan umum. Faktor pertama adalah *platform* Partai NasDem yang menawarkan ide perubahan bagi Indonesia. Seluruh partai politik peserta pemilu tentu memiliki ide perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, namun Partai NasDem memiliki beberapa kekuatan pada *tagline* Gerakan Perubahan; Restorasi Indonesia yang di usungnya. Ide atau gagasan perubahan yang ditawarkan Partai NasDem tidak hanya menjadi strategi kampanye yang digaungkan

²³ Buku Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Jakarta, 2011, halaman 34

²⁴ Ibid, hal 34

saat menjelang atau ketika menghadapi masa kampanye, melainkan menjadi salah satu pilar ideologi partai yang secara konsisten disosialisasikan pada kader secara internal, dan menjadi landasan penyusunan strategi politik partai dalam keseharian.

Tawaran gerakan perubahan melalui jargon Restorasi Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama Partai NasDem sebagai partai politik baru untuk merebut perhatian masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Surya Paloh dengan gaya orasinya yang bersemangat dan berapi-api menjelaskan bahwa situasi sosial politik Indonesia saat ini sangat membutuhkan perubahan. Perubahan tidak bisa ditunggu datang dari inisiatif elite politik tetapi harus dimulai dari rakyat dan berbagai elemen masyarakat.

Penggunaan kata “restorasi” memiliki daya tarik tersendiri karena diksi (pilihan kata) ini tidak terlalu sering digunakan dalam diskursus politik Indonesia sebagai konseptualisasi gagasan politik bila dibandingkan dengan kata-kata lain seperti “revolusi” atau “reformasi”. Dalam artikulasi resminya, Partai NasDem menyatakan bahwa Restorasi Indonesia dipandang sebagai strategi untuk mewujudkan misi Partai NasDem yaitu Gerakan Perubahan. Restorasi Indonesia didefinisikan sebagai gerakan untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita dan tujuan Proklamasi 1945 yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan²⁵.

Melalui gerakan Restorasi Indonesia ini, Partai NasDem ingin mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara dan bangsa sebagai dasar kehidupan bersama. Restorasi dilakukan sebagai upaya perubahan untuk memperbaiki kondisi Negara dan bangsa yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan dan cita-cita semula seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (1), memajukan kesejahteraan umum (2) serta turut serta dalam menjaga perdamaian dunia (3). Jadi kesimpulannya pemikiran tentang Restorasi ini didasari atas kesadaran bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang dicita-citakan saat Proklamasi Kemerdekaan 1945 belum terwujud hingga detik ini.

²⁵ Buku Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Jakarta, 2011, halaman 23

Restorasi Indonesia sebagai gagasan perubahan disusun secara lengkap dari mulai dasar filosofis-historis hingga turun menjadi gagasan teknis dan strategis di lapangan dalam aktivitas politik Partai NasDem. Hal itulah yang menjadikan Restorasi Indonesia begitu melekat dengan persepsi publik terhadap Partai NasDem. Restorasi Indonesia menjadi semacam *brand recognition* bagi Partai NasDem di mata publik dan calon pemilih Indonesia. Posisi Partai NasDem sebagai partai baru juga menguntungkan secara strategis karena partai baru dengan catatan nol dan bersih yang mengusung ide perubahan yang diterjemahkan secara sistematis tentu saja menarik perhatian calon pemilih.

Salah satu slogan lain yang menjadi magnet perhatian publik terhadap Partai NasDem adalah “Politik Tanpa Mahar”. Dalam salah satu sesi wawancara dengan penulis, Surya Paloh menjelaskan bahwa platform “Politik Tanpa Mahar” muncul didasarkan dari riset tentang kondisi politik kontemporer Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada partai politik didasari atas anggapan yang beredar dalam masyarakat bahwa partai politik yang bekerja untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek dan ekonomis. Politik pada level apapun menjadi arena “dagang sapi” dan miskin nilai-nilai dan idealisme. Dalam praktik Pilkada misalnya beban pembiayaan partai baik sebagai mesin politik maupun sebagai kelengkapan prasyarat administrasi yang sangat besar seringkali menjadi penyebab utama Kepala Daerah terpilih kemudian terjerat kasus korupsi di kemudian hari karena partai politik pengusungnya menjadi pengendali kebijakan.

Di dorong oleh kenyataan itu akhirnya Partai Nasdem kemudian merilis platform “politik tanpa mahar” yang dimaknai sebagai upaya untuk memotong “lingkaran setan” (*vicious circle*) korupsi Kepala Daerah dan pembiayaan politik partai. Secara sederhana platform ini dapat dimaknai bahwa Partai NasDem membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dari seluruh lapisan masyarakat tanpa dikenakan biaya apapun, atau Partai NasDem bisa mencalonkan Kepala Daerah baik dari kader internal atau tokoh eksternal tanpa ada kontrak politik apapun terkait pembiayaan politik. Platform “Politik Tanpa Mahar” ini memegang peranan pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

b. Bappilu sebagai Mekanisme Inti Pengambilan Keputusan Elektoral

Struktur organisasi partai sangat menentukan model dan alur pembuatan keputusan karena pembuatan keputusan berkaitan dengan wewenang atau tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit dalam suatu organisasi. Lewat pengamatan terhadap struktur organisasi kita juga dapat menentukan area dan aktor konflik, persaingan maupun proses terbentuknya kesepakatan dalam pembuatan suatu keputusan.

Struktur organisasi Partai NasDem, secara garis besar, tidak banyak memiliki perbedaan dengan partai politik lain. Susunan pengurus harian dari pusat sampai daerah juga merepresentasikan sebaran dan piramida sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik (lihat lampiran struktur kepengurusan partai). Untuk pembuatan keputusan strategis politis berkaitan dengan Pilkada, Partai NasDem memiliki struktur tersendiri yang didasarkan Peraturan Organisasi Partai (POP) yang bersifat organik.

Peraturan Organisasi Partai (POP) ini mengatur tentang keberadaan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART). Bappilu menjadi semacam gugus tugas partai politik (*Task Force*) dengan garis koordinasi khusus yang langsung terhubung dengan pengurus inti DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dan Ketua Umum partai politik. Anggota Bappilu biasanya terdiri dari pengurus DPP yang memiliki bidang keahlian khusus dalam urusan elektoral. Kedudukan dan wewenang Bappilu berbeda pada masing-masing partai politik sesuai dengan budaya politik dan pola komunikasi masing-masing partai politik. Tetapi secara umum, Bappilu merupakan lokus organisasi yang pusat pengolahan data dan informasi elektoral bagi partai politik.

2. Konstelasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017

Pilkada serentak 2017 adalah Pilkada serentak gelombang kedua yang diselenggarakan oleh Pemerintah setelah penyelenggaraan gelombang pertama pada tahun 2015. Ada 101 wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan hajatan politik tersebut dalam waktu bersamaan terdiri dari 7 Propinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten secara keseluruhan. Dari sekian banyak wilayah tersebut, Pilkada DKI Jakarta adalah episentrum politik dari sisi persaingan politik maupun perhatian publik.

Peta politik menjelang Pilkada DKI Jakarta masih merefleksikan bipolaritas kekuatan politik nasional yang tersisa dari Pilpres 2014. Keberhasilan Joko Widodo yang meninggalkan posisi Gubernur DKI Jakarta untuk kemudian meraih kemenangan dalam pilpres 2014 yang sarat dengan kampanye identitas dan isu SARA ternyata masih menyisakan cerita di titik awal pusaran persaingan dua kubu politik yang semakin panas. Gerindra yang bersama PDI-Perjuangan berkongsi mengusung pasangan pemenang Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama, berubah menjadi lawan politik ketika menjelang Pilpres 2014 PDI-P mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden Indonesia berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa PDI-P sebenarnya memiliki komitmen untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung pencalonan dirinya.

Peristiwa pecah kongsi Gerindra dengan PDI-P ini akhirnya menjadi batu pijakan awal peta persaingan politik dan pola koalisi yang berlangsung cukup lama dari mulai Pilpres 2014 hingga Pilkada DKI 2017.²⁶ Secara garis besar kemudian terbentuk dua kelompok koalisi besar dengan Gerindra dan PKS berhadapan dengan koalisi partai-partai politik yang dipimpin oleh PDI-Perjuangan, menyisakan Partai Demokrat sebagai pendulum penyeimbang di tengah. Peta koalisi ini sangat konsisten dengan peta koalisi Pilpres 2014.

Dalam berbagai pilkada di daerah sebenarnya pola koalisi partai jauh lebih cair dan sama sekali tidak tegak lurus dengan pola koalisi di pusat (dalam konteks pilpres). Ada berbagai faktor yang melandasi fakta tersebut diantaranya adalah dinamika politik lokal yang sangat variatif, pragmatisme penjumlahan perolehan kursi sebagai syarat pengajuan calon, serta ada pula faktor kedekatan personal elite politik lokal yang tentu saja berbeda dengan elite politik nasional. Selain itu masih ada faktor kultural dan sosiologis yang memungkinkan partai-partai yang terlihat berseberangan di tingkat nasional bisa berkoalisi mengusung calon yang sama dalam pilkada. Pada konstelasi politik menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 hal ini tidak terjadi. Pola koalisi nasional bawaan pilpres 2014 justru sangat kuat mewarnai komunikasi politik sejak awal

²⁶ Peta persaingan ini bahkan berlangsung lebih lama hingga Pilpres 2019 ketika pasangan calon presiden yang bertarung untuk periode 2019-2024 masih menghadapi figure yang sama yaitu Joko Widodo, yang kini menjadi inkumben dengan Prabowo Subianto. Dua kandidat ini juga merefleksikan peta koalisi dan dukungan yang relatif sama dengan 5 tahun sebelumnya.

penjaringan bakal calon hingga pada titik akhir penetapan pasangan calon. Hal ini menjadi dasar argument penulis untuk menunjukkan bahwa salah satu urgensi dari pilkada DKI Jakarta 2017 adalah posisinya sebagai *proxy* dari pertarungan elite nasional.

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) resmi dilantik sebagai Gubernur Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Rabu 19 November 2014. Ahok menggantikan posisi Joko Widodo yang berhasil menduduki kursi Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan Pemilihan Umum Presiden 2014. Di hadapan wartawan berbagai media massa Ahok menyatakan bahwa tugas utamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah merampungkan reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak era dia menduduki kursi Wakil Gubernur dan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pasca kemenangan pasangan yang diusung oleh PDI-P dan Gerindra dalam Pilkada DKI 2012²⁷.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu *platform* andalan kampanye pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama pada Pilkada DKI 2012. Langkah pertama yang dilakukan oleh pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama berkaitan dengan program reformasi birokrasi adalah menyelenggarakan lelang jabatan di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Program lelang jabatan ini menuai apresiasi positif dari publik.

Dalam aspek politik Ahok mengambil langkah yang cukup frontal ketika masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra, partai politik yang mengusungnya untuk berpasangan dengan Joko Widodo pada Pilkada DKI 2017. Langkah ini diambil sebagai buntut perbedaan prinsip politiknya dengan keputusan Partai Gerindra yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD.

Ahok beranggapan bahwa keputusan Partai Gerindra yang diimplementasikan dalam voting pada Sidang Paripurna DPR RI untuk mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti sebelum era reformasi bertentangan dengan prinsip politik yang dipegangnya bahwa kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan

²⁷ VoA Indonesia, Presiden Jokowi Lantik Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta dalam <https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html>

bertanggung jawab secara langsung pada rakyat yang dipimpinnya²⁸. Keputusan Ahok untuk mengundurkan diri dari Partai Gerindra menimbulkan persepsi yang berlawanan di mata publik sekaligus di mata partai politik.

Dengan catatan karir politik kepartaian seperti di atas, Ahok justru menerima persepsi positif dari publik sebagai politisi yang memiliki integritas pribadi sehingga tidak mudah tunduk pada kehendak partai. Citra ini terbangun seiring sejalan dengan citra partai politik yang memang rendah di mata publik. Tingkat kepercayaan publik yang rendah pada partai politik justru menguntungkan bagi citra pribadi Ahok yang dianggap mampu menawarkan *bargaining position* yang kuat terhadap kebijakan partai politik. Sebaliknya bagi partai politik, posisi terakhir Ahok yang non-partai dan catatan karir kepartaiannya yang berpindah-pindah justru mendatangkan persepsi negatif terutama dalam konteks loyalitas dan komitmen. Hal ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu pertimbangan partai politik sebelum menentukan dukungannya pada Ahok untuk mencalonkan diri pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

a. Kiprah Politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)

Basuki Tjahaya Purnama adalah politisi kelahiran Belitung pada 29 Juni 1966 dari pasangan Indra Tjahaya Purnama dan Buniarti Ningsing yang merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia. Ahok mengawali karir politiknya sebagai Ketua DPC Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) Kabupaten Belitung pada tahun 2004. Pada tahun yang sama Ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung yang di jabatnya selama satu tahun sebelum kemudian maju sebagai calon Bupati Belitung Timur pada Pilkada Belitung Timur 2005. Ahok memenangkan pemilihan dengan 37% suara dan menjabat sebagai Bupati Belitung Timur sejak tahun 2005. Prestasinya selama memimpin Kabupaten Belitung Timur membuat Ahok mendapat tawaran untuk maju sebagai calon Gubernur Bangka Belitung pada Pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Pada Pilkada tersebut Ahok kalah dari Eko Maulana Ali.

Dalam Pemilu legislatif 2009 Ahok kembali merintis karir politiknya dengan maju sebagai anggota legislatif pusat DPR RI melalui Partai Golkar dan ditempatkan

²⁸ Dalam <https://www.merdeka.com/politik/4-alasan-ahok-keluar-dari-gerindra/ahok-sudah-tak-bisa-menaati-keputusan-gerindra.html>

pada nomor urut calon legislatif ke 4 dari partai politik berlambang pohon beringin tersebut. Walaupun berada pada nomor urut yang tergolong rendah namun Ahok mendapatkan suara terbanyak dan berhak melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat Bangka-Belitung di DPR RI karena aturan pemilihan umum legislatif pada waktu itu menggunakan aturan pemenang berdasarkan suara calon terbanyak bukan bergantung nomor urut yang ditentukan partai politik. Di DPR Ahok duduk di Komisi II dan mulai di kenal sebagai anggota DPR yang vokal dan kritis²⁹.

Selama berkiprah sebagai politisi Ahok menerima beberapa penghargaan penting dari berbagai pihak atas sikap kritis dan ketegasan dalam menolak praktik korupsi. Pada tahun 2006 Majalah mingguan TEMPO menobatkan Ahok sebagai salah satu dari 10 Tokoh Nasional yang akan Merubah Indonesia”. Tahun 2007 Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dan Masyarakat Transparansi Indonesia menobatkan Ahok sebagai salah satu “Tokoh Anti Korupsi” dari pihak penyelenggara Negara atas prestasinya selama memimpin Kabupaten Belitung Timur.

Karir politik dan popularitas Ahok semakin menanjak ketika Gerindra secara resmi mengajukannya sebagai calon wakil Gubernur Jakarta mendampingi Joko Widodo dari PDI-P untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2012. Ahok yang saat itu masih bertugas sebagai anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi Golkar segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR dan anggota Partai Golkar setelah berbicara langsung dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Partai Golkar juga melepas Ahok untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra berpasangan dengan Joko Widodo yang diajukan oleh PDI-P tanpa konflik yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Golkar, Ahok yang keluar dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Gerindra tidak dianggap sebagai potensi ancaman yang serius pada waktu itu baik dalam Pilkada DKI 2012 yang telah menjelang maupun di masa depan. Pilihan Partai Gerindra untuk menyandingkan Ahok dengan Jokowi sebagai pasangan kandidat untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 lebih dimaknai sebagai strategi *surprise factor* semata. Pada akhirnya Pilkada DKI Jakarta 2012 menjadi tonggak sejarah bagi karir politik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

²⁹ <http://bio.or.id/biografi-ahok-basuki-tjahaja-purnama/>

b. Isu SARA Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017

Situasi sosial politik Jakarta cenderung memanas menjelang Pilkada 2017. Isu politik yang bersifat *high politic* (politik kekuasaan terkait dengan momen elektoral) berjaln berkelidan dengan isu sosial (*low politics*) terkait identitas dan keberagamaan hingga tidak dapat lagi dianalisa secara terpisah. Bipolaritas sosial akibat Pilpres 2014 masih tersisa bahkan hingga dua tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Intensitas pertentangan politik, terutama di media sosial kembali naik membawa sentimen SARA dan politik identitas beriringan dengan semakin dekatnya momen politik Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada awalnya, dinamika isu sosial ini berkembang dari Jakarta dan berawal dari isu kepemimpinan Ahok di Jakarta yang dianggap sebagai representasi minoritas Tionghoa-Kristen yang tidak sesuai dengan mayoritas penduduk Jakarta yang beragama Islam. Ketika kontestasi kandidat kemudian meluas menjadi isu sosial bertema politik identitas dengan tema utama penistaan agama maka pusaran isu kemudian meluas dengan berbagai pola dan dinamika yang berbeda-beda ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Di Jakarta isu SARA dalam kepemimpinan Ahok secara konsisten di bawa oleh FPI (Front Pembela Islam) dalam berbagai demonstrasinya menentang beberapa kebijakan Ahok yang tidak berpihak pada umat muslim di Jakarta. Beberapa kebijakan tersebut antara lain, pengangkatan PNS non-muslim sebagai pejabat Camat di salah satu wilayah Jakarta, pelarangan penjualan dan pemotongan hewan kurban di area publik, pelarangan acara pawai sahur dan takbir di jalan raya, dan lain sebagainya. FPI menjaga isu ini terus di permukaan dan menjadi pembicaraan publik melalui berbagai aktivitas, selain demonstrasi, isu pemimpin non-muslim juga bergema di berbagai acara pengajian dan aktivitas sosial lainnya.

Secara garis besar, isu SARA yang berkembang dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 ini memuncak kemudian berawal dari sebuah postingan media sosial dari seseorang bernama Buni Yani yang berisi tentang potongan pidato Gubernur petahan Basuki Tjahaya Purnama di Kepulauan Seribu, Jakarta pada tanggal 27 September 2016. Pada potongan pidato tersebut Ahok, sapaan akrab dari sang Gubernur petahana menyebutkan tentang ayat Al Quran yang sering digunakan sebagai rujukan tentang memilih pemimpin bagi umat Islam. Postingan yang pertama

kali beredar pada 6 Oktober 2016 pada akun *facebook* Buni Yani ini segera menjadi viral dan menjadi polemik yang hangat di masyarakat³⁰.

Pusaran isu penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks dinamika politik lokal Jakarta menjelang Pilkada Gubernur 2017. Isu ini bahkan kemudian berkembang menjadi serangkaian aksi massa umat Islam yang diinisiasi oleh gerakan yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF). Tercatat terjadi dua kali demonstrasi besar-besaran dengan jumlah ratusan ribu massa yang berimplikasi pada penyiapan aparat keamanan dalam jumlah yang cukup besar pula pada tanggal 4 Oktober 2016 yang kemudian berlanjut pada 2 Desember 2016. Pada ranah hukum isu ini berkembang hingga proses pengadilan Ahok yang berjalan beriringan dengan proses Pilkada Jakarta.

3. Model Pengambilan Keputusan Rasional Partai NasDem dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

a. NasDem *Play to Win*

Di internal Partai NasDem pembicaraan tentang Pilkada DKI Jakarta tidak hanya menjadi ruang eksklusif kepengurusan partai di tingkat propinsi atau DPW (Dewan Pengurus Wilayah) DKI Jakarta. Gengsi dan level persaingan politik Pilkada DKI Jakarta dianggap jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Belajar dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta lima tahun sebelumnya, figur yang tampil dalam persaingan politik untuk merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur ini mendapatkan perhatian publik lebih luas dan berpeluang untuk naik menjadi kandidat dalam Pilpres 2019. Secara berseloroh, Ketua DPP Garda NasDem dalam wawancara dengan penulis menyebut bahwa “Djakarta adalah koentji” bagi semua partai politik untuk menguji kinerja elektoralnya sebelum memasuki Pileg-Pilpres serentak 2019.

Di kalangan internal Partai NasDem sendiri, perhitungan tentang posisi NasDem dalam Pilkada DKI Jakarta justru tidak bertumpu pada pola koalisi partai untuk mencari peluang menaikkan kadernya sendiri, baik untuk kursi calon Gubernur

³⁰ Pidato di Kepulauan Seribu hingga Hari-hari Ahok Menjadi Tersangka” BBC, dalam www.bbc.com 17 November 2016, akses tanggal 8 April 2017.

maupun calon Wakil Gubernur. Sejak Pilpres 2014, strategi elektoral NasDem bertumpu pada calon atau sosok – profil personal pemimpinnya, terutama faktor popularitas dan akseptabilitas (penerimaan) publik terhadap calon tersebut. Hal ini sempat ditegaskan kembali oleh Ketua Umum Surya Paloh dalam pidatonya ketika membuka Rapat Koordinasi pertama untuk persiapan Pilkada Serentak 2017 di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Surya Paloh menyebut bahwa dalam konteks elektoral baik itu Pilpres ataupun Pilkada, Nasdem adalah partai terbuka yang menginginkan seorang pemimpin terbaik. Jadi NasDem tidak berorientasi eksklusif pada kader internalnya tetapi secara terbuka mengundang siapapun untuk berkomunikasi dan mendaftarkan diri ke partai NasDem sebagai calon pemimpin. Dalam bahasa lain, Surya Paloh bahkan meminta pengurus partai untuk pro-aktif menjaring calon pemimpin dan memetakan akseptabilitas publik mereka untuk mencari calon pemimpin paling potensial untuk didukung dalam Pilkada. Dengan *tagline* “politik tanpa mahar” atau seringkali disingkat “NasDem anti mahar”, pola penjangkaran terbuka NasDem memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri dan bertarung dalam Pilkada.

Pada sisi lain, kebijakan penjangkaran calon terbuka ini menurut Irma Chaniago, sekretaris Fraksi NasDem di DPR RI, didasari oleh kepentingan untuk meraih kemenangan. “Jadi *tagline* internal kita dalam pilkada serentak sebenarnya adalah NasDem *play to win*”. Menurut Irma, kemenangan demi kemenangan dari calon yang didukung NasDem dalam Pilkada akan memberi insentif positif bagi pengenalan partai dan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa orientasi utama NasDem dalam pilkada bukan mendudukkan kadernya sebagai kepala daerah, tetapi lebih pada membangun akseptabilitas dan popularitas partai dalam jangka panjang. Partai NasDem menyadari benar posisinya sebagai partai kecil sehingga belum berorientasi langsung untuk menjadi partai penguasa.

Model penjangkaran calon secara terbuka ini bukan tidak memiliki resiko *backfire*. Di kalangan internal sempat terbaca semacam kegelisahan dari para pengurus partai yang merasa tidak memiliki *privilege* sama sekali untuk mencoba berkompetisi dalam pilkada karena harus bersaing secara terbuka dengan calon-calon dari luar

partai. Tetapi sebagai partai modern yang berlandaskan pada aturan-aturan tertulis, semua keputusan partai dijalankan dengan konsisten oleh seluruh pengurus partai.

Model penjaringan terbuka ini juga memiliki argument ideal selain sisi pragmatis “*play to win*” yang dijelaskan oleh Irma Chaniago. Dari penjelasan saat sesi wawancara pertama dengan penulis, menjelaskan bahwa orientasi terbuka NasDem dalam memilih calon yang akan didukung dalam Pilkada didasarkan pada kehendak rakyat, atau calon pemimpin yang paling disukai publik. Jadi dengan mendukung calon pemimpin dengan nilai akseptabilitas yang paling tinggi akan menempatkan NasDem bukan saja sebagai partai penyokong calon pemenang tetapi juga NasDem sebagai penyambung aspirasi rakyat dalam pilkada.

b. Bappilu: *Epicentrum* Pembuatan Keputusan Elektoral Partai NasDem

Arahan tentang tujuan dan panduan garis besar kebijakan elektoral ini kemudian diterjemahkan oleh Bappilu dalam panduan teknis untuk melakukan seleksi dari para bakal calon yang masuk dari proses awal yaitu tahapan penjaringan dengan menggunakan mekanisme yang bersifat objektif. Di internal partai NasDem, baik calon dari partai maupun mereka dari luar partai, kesempatan mereka untuk terus maju dan mendapatkan rekomendasi yang bergantung pada satu faktor yaitu hasil survey baik itu survey popularitas maupun elektabilitas. Survey itu dilakukan baik oleh internal partai NasDem melalui alat kelengkapan Bappilu maupun survey oleh Surveyor dan lembaga survey independen yang dinilai kredibel.

Pada tahapan penjaringan awal sekitar bulan Januari tahun 2015, pembicaraan tentang calon yang akan didukung oleh NasDem sebenarnya hanya berfokus pada dua nama saja yaitu Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang telah menyatakan bahwa dirinya akan maju bertarung dalam pilkada serta Ahmad Syahrini, Anggota Komisi I DPR RI yang berasal dari Partai NasDem terpilih dari Daerah Pemilihan Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu nama Ahmad Syahrini kemudian tenggelam dengan sendirinya karena pada prosesnya, hingga bulan Maret 2015 – namanya tak pernah muncul sebagai bagian dari *Top of Mind* warga Jakarta berdasarkan survey dari berbagai lembaga survey independen.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka praktis nama Ahok menjadi bahan pembahasan tunggal dalam mekanisme Bappilu terkait dengan Pilkada DKI Jakarta.

Pada Rapat Internal Bappilu antara Bappilu pusat dengan struktur Bappilu Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015, pembahasan mengerucut pada pilihan untuk mendukung atau tidak mendukung Ahok karena dengan kepemilikan 5 kursi di DPRD DKI Jakarta, posisi NasDem jelas tidak terlalu penting bila tidak menambahkan aspek “waktu” - atau kecepatan dalam pengambilan keputusan. Artinya NasDem sebagai partai politik baru, bahkan satu-satunya partai politik baru yang lolos *parliamentary threshold* dari Pemilu Legislatif 2014, harus keluar dari kerumunan rombongan “partai kecil” dengan strategi tambahan yaitu kecepatan pengambilan keputusan.

Hal ini disadari sepenuhnya, terutama oleh para anggota inti Bappilu seperti Sri Sundjunadi dan Effendi Choirie yang berpengalaman menggawangi Bappilu NasDem sejak pileg dan pilpres 2014. Pasca pileg 2014, dengan kepastian perolehan suara yang menduduki peringkat ke 9 dari 10 partai politik yang berhasil lolos dari *parliamentary threshold* dan 36 kursi di DPR RI, - maka NasDem akan segera tenggelam dalam gelaran Pilpres yang akan dihelat beberapa bulan setelahnya bila tidak mengambil inisiatif terlebih dahulu.

NasDem langsung bergerak cepat menyatakan dukungannya pada Jokowi untuk menjadi calon presiden RI dalam pilpres 2014 hanya dengan berpegangan pada hasil survey elektabilitas yang terus menunjukkan trend positif Jokowi yang bahkan sudah melewati Prabowo Subianto, calon presiden dengan elektabilitas terkuat menurut sigi lembaga survey sejak tahun 2011. NasDem mendeklarasikan Jokowi sebagai capres RI 2014 ketika bahkan PDI-Perjuangan sebagai partai politik pemilik suara terbesar sekaligus parpol yang menaungi Jokowi justru masih bergulat dengan faksionalisasi internalnya sendiri untuk mencalonkan Megawati sebagai presiden dan Jokowi justru sebagai wakil presiden.

Gerakan cepat ini berhasil menempatkan NasDem sebagai partai baru dengan perolehan suara kecil namun strategis dalam isu pilpres 2014. NasDem kemudian, selain dikenal sebagai partai pertama yang mendukung Jokowi untuk maju pilpres, NasDem kemudian juga dikenal sebagai partai pendukung utama Joko Widodo dalam kebijakannya sebagai Presiden RI ketika PDI-P justru terkesan ingin menuatkan klaimnya sebagai “pemilik” Jokowi dengan identifikasi sebagai “petugas partai”.

Menjelang pilkada DKI 2017, Bappilu NasDem, seperti yang diceritakan kembali oleh Gus Choi, sapaan Effendi Choirie- membaca situasi dan peluang sama

seperti menjelang Pilpres 2014. Dengan jumlah kursi yang tidak signifikan untuk mengajukan calon sendiri, NasDem tidak terjebak dalam pola *bandwagoning* koalisi yang kadang mengharuskan partai kecil harus menunggu terlalu lama untuk memainkan jatah kursinya. Di saat partai lain masih ragu-ragu dan bersikap *wait and see* menimbang karakter personal Ahok, resistensi sebagian publik, profilnya sebagai *double minority* tetapi di lain pihak tetap sebagai calon terkuat dari sisi sigi lembaga survey karena berbagai kebijakannya yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Jakarta. NasDem dapat mengambil kesempatan untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Ahok terlebih dahulu.

Tuntutan kecepatan dalam membuat keputusan ini mendorong Bappilu segera membuat kajian untuk memperhitungkan peluang rasional Ahok untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Rapat-rapat Bappilu pusat dan Bappilu DKI Jakarta kemudian difokuskan untuk mencermati elektabilitas Ahok dari berbagai survey dari lembaga independen. Aktivitas ini juga diimbangi dengan menjalankan mekanisme verifikasi internal seperti yang telah diatur dalam tupoksi Bappilu sebagai struktur organik partai untuk kebijakan elektoral.

Sepanjang separuh akhir tahun 2015 Bappilu Partai Nasdem melakukan dua kali survey internal yang hasilnya cukup konsisten menunjukkan bahwa Ahok memiliki elektabilitas paling tinggi bila dibandingkan dengan nama-nama lain yang beredar dalam bursa DKI-1. Hasil ini juga sejalan dengan trend hasil survey lembaga independen lainnya yang masih menempatkan Ahok sebagai calon terkuat. Pada Rapat Koordinasi Wilayah Jakarta, Prananda Paloh sebagai ketua umum Garda NasDem masih meminta tim Bappilu untuk bersikap hati-hati dan mewaspadaai setiap isu yang dapat mempengaruhi trend elektabilitas terutama isu yang berkembang berbasis medsos. Hal ini sebenarnya juga relevan mengingat karakter personal Ahok yang meledak-ledak juga mudah memicu konflik dan menyediakan bahan materi untuk diolah demi kepentingan politik yang berlawanan. Selain itu situasi masih mungkin berjalan dengan dinamis karena bursa calon masih sepenuhnya berasal dari opini publik belum menampakkan hasil kinerja maupun komunikasi politik partai maupun elite.

c. Faktor-faktor Utama Pertimbangan Bappilu

Faktor-faktor penting yang membuat banyak partai politik terkesan “menahan diri” dan bersikap “*wait and see*” dalam menyatakan dukungannya terhadap Ahok adalah kepribadiannya yang kontroversial dan isu SARA yang melingkupi Ahok sebagai representasi minoritas. Selain itu ada beberapa sangkaan kasus hukum yang juga mewarnai perjalanan kepemimpinan Ahok di Jakarta. Pada tataran internal partai politik, PDI-P sebagai pemain utama pemegang kursi mayoritas yang mampu mencalonkan wakilnya tanpa koalisi; mengalami *dilemma* karena sebagian kader-kadernya di Jakarta menginginkan calon PDI-P berasal dari kalangan internal partai. Nama Tri Risma Harini, walikota Surabaya menjadi opsi yang cukup menggiurkan untuk bertarung berhadapan-hadapan langsung dengan Ahok. Dari segi prestasi dan popularitas, Risma dinilai sebagai calon yang paling potensial- untuk berangkat dari PDI-P untuk bertarung merebut kursi Jakarta-1

Di sisi lain, faktor-faktor yang menjadikan Ahok dinilai sebagai calon potensial untuk kembali menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 adalah, yang pertama tentu saja popularitas dan elektabilitas yang stabil dan menjadi yang tertinggi bila dibandingkan dengan calon-calon lain. Walaupun formasi koalisi belum terbentuk dan mayoritas partai politik terutama dari kubu oposisi nasional masih mencari tandingan yang sepadan untuk Ahok, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa survey elektabilitas Ahok sangat meyakinkan. Faktor lain adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja pasangan Ahok-Djarot selama memimpin Jakarta. Tingkat kepuasan terhadap kinerja petahana (*incumbent*) selama menjabat tentu menjadi poin penting bagi partai politik untuk memperhitungkan peluang kemenangan calon yang didukungnya dalam kontestasi Pilkada.

Berdasarkan survey lembaga Poltracking yang dipublikasikan pada 15-9-2016 memperlihatkan bahwa kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja pemerintahan Ahok-Djarot mencapai 68.72 % sedangkan jumlah responden yang tidak puas terhadap kinerja Ahok-Djarot mencapai 27.44% sedangkan sisanya tidak memberikan jawaban. Dari data lanjutan dalam survey tersebut juga dinyatakan bahwa sumber utama penilaian kepuasan terhadap kinerja Ahok-Djarot adalah pernyataan responden yang menilai bahwa kedua pemimpin tersebut berhasil mewujudkan pelayanan kesehatan

yang terjangkau oleh masyarakat luas (75.4%) dan pembangunan infrastruktur terutama untuk fasilitas umum publik (69.7%)³¹.

Selain 27.4% warga Jakarta yang masih belum puas terhadap kinerja pasangan Ahok-Djarot, masih ada beberapa isu pembangunan yang juga menjadi sumber penilaian negatif dari keseluruhan kinerja pasangan ini. Masalah kemacetan Jakarta adalah salah satu sumber ketidak-puasan responden. Sebanyak 24.9 responden menganggap bahwa pasangan Ahok-Djarot masih belum mampu mengurangi kemacetan Jakarta. Pun begitu dengan pemenuhan barang kebutuhan pokok, pasangan ini dinilai publik belum bisa menjamin ketersediaan barang pokok dengan harga yang terjangkau di Jakarta (23%).

Bappilu NasDem yang dilengkapi dengan lembaga riset dan litbang yang berdiri tersendiri memproses informasi tentang segala berkaitan dengan Ahok sebelum mengajukannya ke Rapat Pleno Partai NasDem untuk Pilkada Serentak 2017. Hasil survey elektabilitas Ahok dan beberapa nama yang muncul menjadi pesaingnya serta survey tentang kepuasan publik terhadap kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta selama beliau menjabat sebagai Gubernur menjadi timbangan utama di sisi plus, sementara itu Bappilu menindak-lanjuti aspek minus yang masih menjadi ganjalan perhitungan kemenangan Ahok yaitu dua kasus hukum; (1) RS Sumber Waras dan Reklamasi serta (2) kampanye SARA yang menyerang personal profil Ahok.

Bappilu mengembangkan dua model proses untuk mendalami kasus hukum yaitu; penelitian hukum untuk mempelajari isu kasus Sumber Waras dan reklamasi serta menggunakan jaringan politiknya untuk memperoleh informasi dan kejelasan posisi kasus ini dari aspek politik. Walaupun tidak secara terbuka mengungkapkan pola penggunaan *networking* politik tersebut, Prananda Paloh, menyebutkan dalam satu sesi wawancara bahwa, Bappilu berhasil meyakinkan bahwa isu hukum yang melilit Ahok, baik terkait Sumber Waras maupun Reklamasi teluk Jakarta masih bersifat sumir dan lemah. Hal ini yang menjadikan pertimbangan untuk memilih Ahok menjadi semakin kuat.

³¹<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/17215661/survei.poltracking.mayoritas.warga.jakarta.puas.kinerja.ahok-djarot>

Aspek dinamika yang lebih dikhawatirkan oleh NasDem dalam proses penentuan dukungan untuk Ahok justru pada isu SARA. Isu pemimpin muslim/non muslim berkembang semakin kuat justru bukan pada substansi kepemimpinannya tetapi lebih pada atribusi identitas yang menjadi pokok permasalahan. Perdebatan makan surat Al-Maidah menjadi muatan diskursus yang berkembang dengan kecenderungan merugikan atau melemahkan posisi Ahok di mata pemilih muslim Jakarta. Satu-satunya pijakan data yang digunakan untuk meng-*counter* diskursus politik identitas dan politik SARA ini adalah keyakinan bahwa karakteristik pemilih Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara dengan rata-rata tingkat pendidikan penduduknya yang memadai adalah bahwa sebagian besar dari mereka adalah pemilih rasional. Pemilih rasional adalah kelompok pemilih dengan karakteristik berpendidikan menengah-tinggi dan menentukan dasar pilihannya berdasarkan program kampanye dan rekam jejak calon pemimpin, bukan berdasarkan identitas.

d. Diskusi Teoritik

Teori pilihan rasional dalam perspektif James Coleman menegaskan bahwa aktor selalu menentukan tujuan dalam setiap tindakannya dan kemudian memperhitungkan pilihan-pilihan tindakan yang tersedia berdasarkan kesesuaian dengan tujuan tersebut. Dalam kasus ini tujuan partai NasDem dalam Pilkada tercemin dari ketentuan prinsip dasar yaitu penguatan identitas partai (*party identification*) untuk kepentingan jangka panjang. Platform “politik tanpa mahar” adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang lebih luas (*thick rational model of decision making*), kebijakan untuk mendukung Ahok dengan keputusan cepat, jauh mendahului partai-partai politik lain, bahkan partai politik pemilik jumlah kursi yang lebih besar dan signifikan adalah manifestasi dari tujuan awal dari partai NasDem untuk membangun *party identification* di kalangan pemilih sebagai partai modern. Posisi NasDem sebagai partai baru yang belum memiliki basis dukungan kultural menjadikan kebijakan penguatan *party identification* menjadi investasi yang sangat berharga untuk masa depan. Kebijakan ini sekaligus dapat dibaca sebagai strategi *market positioning* partai NasDem sebagai partai baru yang harus menentukan

ceruk pasar suara sekaligus membangun kedekatan jangka panjang dengan pemilih yang semakin terdidik dan rasional.

Dalam konteks keputusan dukungan terhadap Ahok ini, tujuan penguatan *party identification* dalam pertimbangan NasDem akan tercapai dengan dua jalan yaitu lewat kemenangan Ahok yang diprediksi lewat survey elektabilitas dengan nilai tertinggi di banding dengan bakal calon lain yang beredar awal tahun 2016. Kemenangan Ahok nantinya akan menegaskan partai NasDem sebagai pendukung utama dan pendukung setia sang kandidat dari awal mula proses kandidasi. Hal ini diharapkan akan memberikan efek positif serupa bagi *brand recognition* yang telah terbangun sebelumnya sebagai partai utama pendukung Joko Widodo.

Sedangkan jalan kedua adalah dengan membuat keputusan cepat mendahului partai lain maka partai NasDem memiliki keuntungan ganda. Pertama dalam konteks komunikasi publik, partai NasDem membuktikan komitmennya untuk menegakkan platform “politik tanpa mahar”. Hal ini akan mendapat respon positif dari publik ditengah persepsi terhadap partai politik yang sangat transaksional dalam kebijakan elektoralnya yang seringkali mengabaikan hasrat publik pada nama-nama tertentu untuk dicalonkan. Platform “politik tanpa mahar” dan dukungan terbuka pada calon dengan elektabilitas tertinggi bukanlah tujuan dalam perspektif teori pilihan rasional, dua variabel tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan sebenarnya yaitu penguatan *party identification* yang akan berdampak jangka panjang terhadap akseptabilitas dan elektabilitas partai NasDem di masa depan.

Ada tiga unsur utama yang menjadi motivasi rasional aktor dalam bertindak dalam teori pilihan rasional yaitu dorongan material, dorongan politik dan dorongan psikologis³². Dalam hal ini, partai NasDem sebagai aktor rasional meletakkan tujuan politik tindakannya pada aspek jangka menengah bukan pada aspek transaksional jangka pendek seperti kedudukan atau kekuasaan lewat kemenangan Ahok. Tujuan partai NasDem bukan pula pada aspek jangka panjang yang terkesan sepenuhnya ideologis seperti misalnya perubahan atau perbaikan bagi Indonesia dengan melalui memilih orang-orang baik untuk menjadi pemimpin.

³² Abidah, Laili. DR, *Dinamika Muslimat NU*, Penerbit Pohon Cahaya, Jogjakarta, 2019, halaman 249.

E. KESIMPULAN

Pilkada DKI Jakarta menjadi titik tolak bagi penguatan gaya dan strategi politik elektoral NasDem yang berorientasi pada identitas partai dalam jangka panjang. Sebagai partai yang relatif baru, Nasdem memiliki kekuatan pada platform “politik tanpa mahar” yang kemudian diimplementasikan dalam model proses pengambilan keputusan yang bersifat sangat organik pada lembaga partai yang dinamakan Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) NasDem.

Seluruh proses pembautan keputusan dan penentuan strategi elektoral partai NasDem pada berbagai Pilkada di Indonesia sepenuhnya bertumpu pada mekanisme yang berjalan di Bappilu. Struktur dan kewenangan Bappilu yang tersebar hingga pada tingkat daerah menjadi sumber linier informasi, komunikasi politik hingga suplai calon potensial untuk kemudian diselesaikan proses akhirnya pada tingkat pusat sebagai tahapan final untuk memperoleh surat rekomendasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai NasDem. Pada kasus kandidasi Ahok ini, kendali awal bahkan berada di tangan Bappilu Pusat karena urgensi dan profil tinggi dari Pilkada DKI Jakarta.

“Politik Tanpa Mahar” juga diimplementasikan oleh Bappilu dalam model penjangkaran calon secara terbuka. Selain itu penetapan kriteria dan seleksi calon yang mendaftarkan diri lewat partai NasDem juga dilakukan berbasis sepenuhnya pada hasil survey elektabilitas calon dan hal ini berlaku setara baik pada calon kader maupun calon yang berasal dari publik, tanpa ada privilege khusus. Survey elektabilitas calon adalah kunci dari surat rekomendasi DPP Partai NasDem mengesampingkan pola koalisi partai atau model komunikasi elite, baik elite di tingkat local maupun elite di tingkat daerah.

Temuan faktor lain yang juga penting dan menarik untuk dibahas adalah kecenderungan Partai NasDem untuk menentukan arah dukungan dan memberikan surat rekomendasi jauh lebih awal daripada partai lain. Hal ini memberikan keuntungan pada partai NasDem untuk memperkuat tagline politik tanpa mahar. Dengan komunikasi politik yang sederhana dan cepat kecurigaan akan kontrak atau beban politik terhadap calon dari pihak partai seperti yang selama ini diduga oleh publik dapat ditepis dengan cantik.

Selain itu kecepatan proses pengambilan keputusan yang dipadukan dengan kekuatan konsistensi prinsip penggunaan survey elektabilitas sebagai pegangan utama

untuk menentukan arah dukungan membuat NasDem sebagai partai kecil, dengan rata-rata jumlah kursi sedikit, terlihat menonjol dan menentukan sebagai *King Maker* bukan sekedar penumpang gelap koalisi yang biasanya bergantung pada peran dominan partai-partai besar.

RUJUKAN

BUKU:

1. Abidah, Laili. DR, *Dinamika Muslimat NU*, Penerbit Pohon Cahaya, Jogjakarta, 2019
2. Aminah, Siti, Dr., “*Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*”, Kencana, Jakarta, 2014
3. Coleman, James and Thomas J. Fararo, (ed). *Rational Choice Theory: Advocacy and Critique*, SAGE Publications, London, 1992
4. Coleman, James. *Foundation of Social Theory*, Harvard University Press, Cambridge, 1990
5. Duverger, Maurice,. “*Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*” (terj.), Bina Aksara, Jogjakarta, 1981
6. Drakeley, Steven, *The History of Indonesia*, Greenwood Publishing Press, Westport USA, 2005
7. Firmanzah, “*Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik; Pembelajaran Politik Pemilu 2009*”, Yayasan Obor, Jakarta, 2010
8. Geovanie, Jeffrie, *AHOK*, Media Baca Mandiri, Tangerang Selatan, 2016
9. Hofmeister, Wilhelm, & Karsten Grabow, “*Political Parties, Function and Organization in Democratic Societies*”, Konrad Adenauer stiftung, Singapore, 2014
10. Irham, Muhammad Aqil,. *Demokrasi Muka Dua, Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2016
11. Koentjaraningrat, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, PT Gramedia, Jakarta, 1977
12. Lane, Max,. “*Unfinished Nation*”, Penerbit Djaman Baroe, Jogjakarta, 2014
13. Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2010

14. Mintz, Alex & Karl de Rouen, "Understanding Foreign Policy Decision Making", Cambridge University Press, 2010
15. Nawawi, Hadari, Prof., "Metode Penelitian Bidang Sosial", Gadjah Mada University Press, 2001
16. Neuman, W. Lawrence., "*Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach*", 2nd Edition, Pearson Education, 2007
17. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kreasi Wacana, Jogjakarta, 2012
18. Sanit, Arbi., *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1997
19. Strauss, Anselm & Juliet Corbin, "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data" (Cet. IV), Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013

ARTIKEL JURNAL ILMIAH:

1. Dirgantara, Igor., *Jakarta Gubernatorial Election; Who Will be Eliminated*, Research Institute for European and American Studies, www.rieas.gr publication date; 14 January 2017
2. Chen, Jonathan & Satrio Dwi Cahyo, *Jakarta Gubernatorial Election; More Than Just Politics*, RSIS Publication, No.290, 29 November 2016, www.rsis.edu.sg
3. Sconfeld, William R.: *Political Parties: the Functional Approach and the Structural Alternatives*, Comparative Politics, Vol. 15, No.4 (July, 1983)
4. Buehler, Michael and Paige Tan, "*Party Candidate Relationship in Indonesian Local Politics; A Case Study of the 2005 Regional Election in Gowa, South Sulawesi Province*", Journal Indonesia, Vol. 84, Cornell University Southeast Asia Program, 10-2007
5. Polic, Marko, *Decision Making; Between Rationality and Reality*, Interdisciplinary Description of Complex System 7(2), 78-89, 2009
6. Hedstrom, Peter & Charlotta Stern, *Rational Choice and Sociology*, Annu. Rev. Sociol. 1997. 23: 191-214
7. Hechter, Michael & Satoshi Kanazawa, *Sociological Rational Choice Theory*, Annual Review Sociology, 1997, 23: 191-214

8. Levine, Jonathan & Paul Migrom, *Introduction to Choice Theory*, dalam <https://web.stanford.edu/~jdlevin/cv.pdf>
9. Dillon, Stuart M., “*Descriptive Decision Making: Comparing Theory with Practice*”, dalam <http://orsnz.org.nz/conf33/papers/p61.pdf>
10. Soemantri, Gumilar Rusliwa “Memahami Penelitian Kualitatif”, Makara, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.9 No2, Desember 2005
11. Unzonwanne, Francis, “Rational Model of Decision Making”, publication at: <https://www.researchgate.net/publication/311761486>, chapter January 2016
12. Kumar, Karamala Aresh, *Role and Functions of Political Party in Democracy*, South-Asian Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS), ISSN: 2349-7858: SJIF: 2.246: Volume 4 Issue

DOKUMEN

1. Materi Penguatan Peran Staf Administrasi dan Tenaga Ahli 2019, Sekretariat Fraksi Partai NasDem DPR RI
2. Buku Partai NasDem, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Jakarta, 2011
3. Materi Paket Peraturan Organisasi 2019, DPP Partai NasDem
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
6. “Bersatu, Berjuang, Menang”. Materi Koordinasi Pilkada Serentak 2016, DPP Partai Nasdem

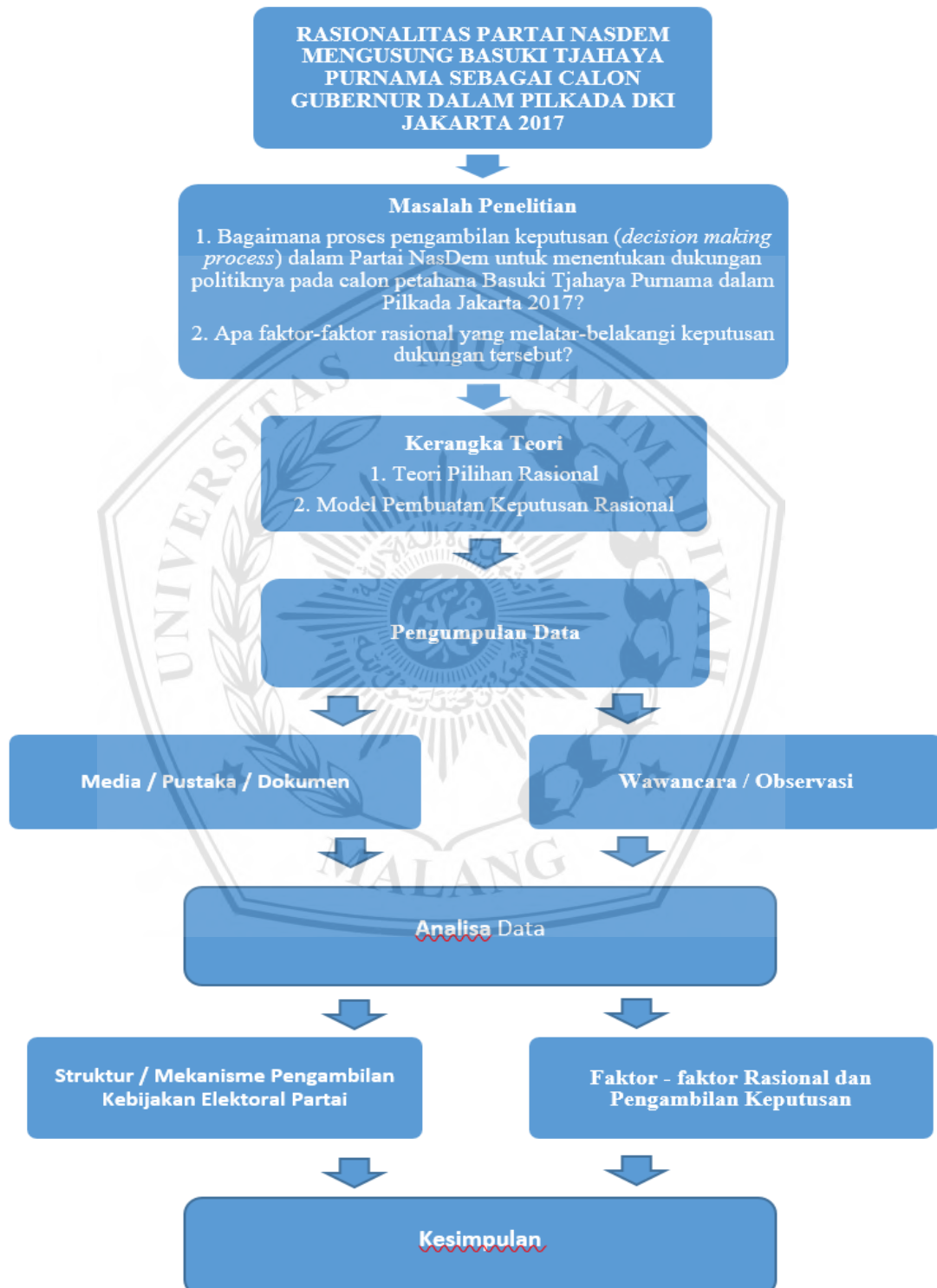
MEDIA MASSA:

1. <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/28/1205285/Nasdem.Juara.di.Bengkulu>
2. *Ahok dan Pusaran Sumber Waras*, Indopos, 6 Agustus 2015, hal 2
3. CNN Nasional, *Pelayanan Publik Pemprov DKI era Ahok Masuk predikat baik*. 05/12/201
4. “Pidato di Kepulauan Seribu hingga Hari-hari Ahok Menjadi Tersangka” BBC, dalam www.bbc.com 17 November 2016, akses tanggal 8 April 2017
5. <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/17215661/survei.poltrackin.g.mayoritas.warga.jakarta.puas.kinerja.ahok-djarot>
6. <http://www.suara-islam.com/read/index/17118/--Nasdem--Partai-Pertama-yang-Dukung-Ahok-Jadi-Cagub-DKI>
7. <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/13094351/Soal.Dukungan.Nasdem.untuk.Ahok.Ini.Komentar.Surya.Paloh>

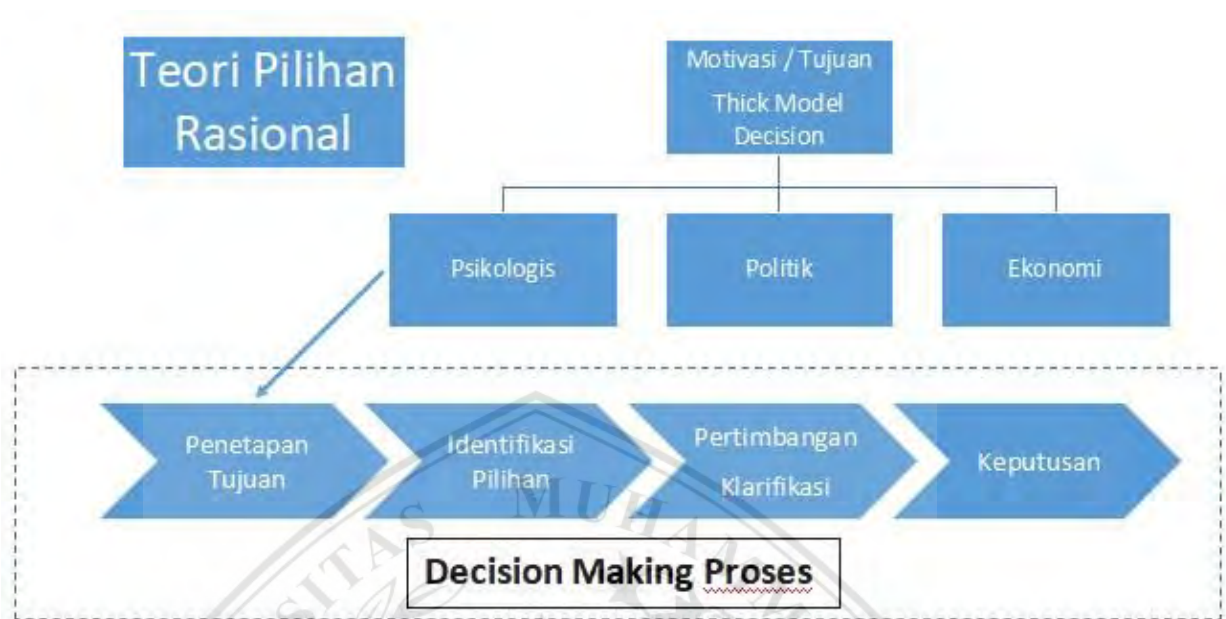
8. <http://news.liputan6.com/read/2457116/4-alasan-ahok-pilih-jalur-independen-di-pilkada-dki>
9. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160311190944-32-116865/akbar-faizal-nasdem-tidak-menyasal-dukung-ahok/>
10. “Ahok Dapat Dukungan Partai NasDem di Pilkada DKI” Republika pada <http://m.republika.co.id> muat tanggal 13 Februari 2016, akses pada 8 April 2017
11. “Jika Tarik Dukungan, NasDem Tak Mau Lagi Ikut Kerja Menangkan Ahok” pada <https://m.detik.com> muat pada 15 November 2016, akses tanggal 8 April 2017
12. “Ahok Jadi Tersangka, Surya Paloh: Dukungan NaDem belum bergeser” pada <https://m.detik.com> muat tanggal 15 November 2016, akses tanggal 8 Januari 2017
13. “Jika Jadi Tersangka, Golkar dan NasDem Tarik Dukungan terhadap Ahok ...” pada <https://www.edunews.id> muat tanggal 16 November 2016, akses tanggal 8 Januari 2017
14. “NasDem akan Mengevaluasi Dukungan terhadap Ahok Jika Terbukti Bersalah...” pada www.kompas.co.id muat tanggal 17 November 2016, akses tanggal 8 Januari 2017

LAMPIRAN

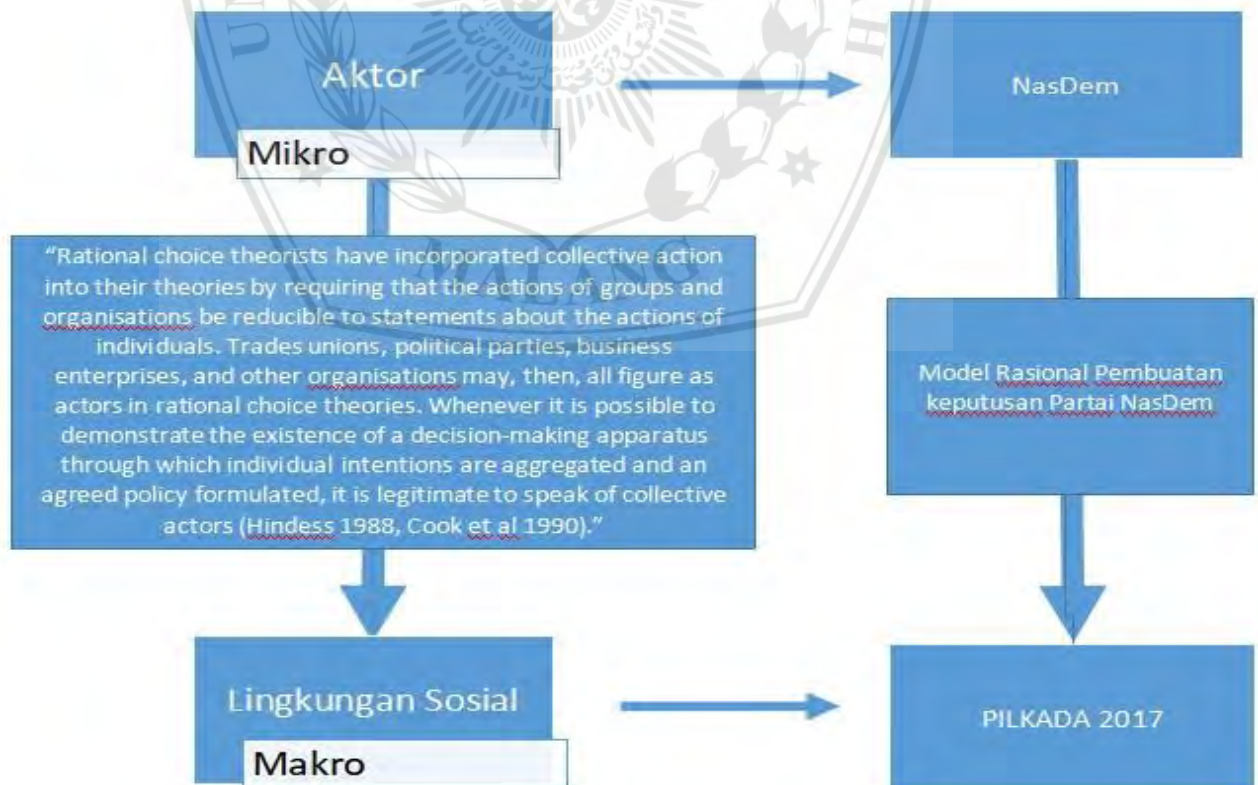
Lampiran 1 : Bagan Kerangka Penelitian



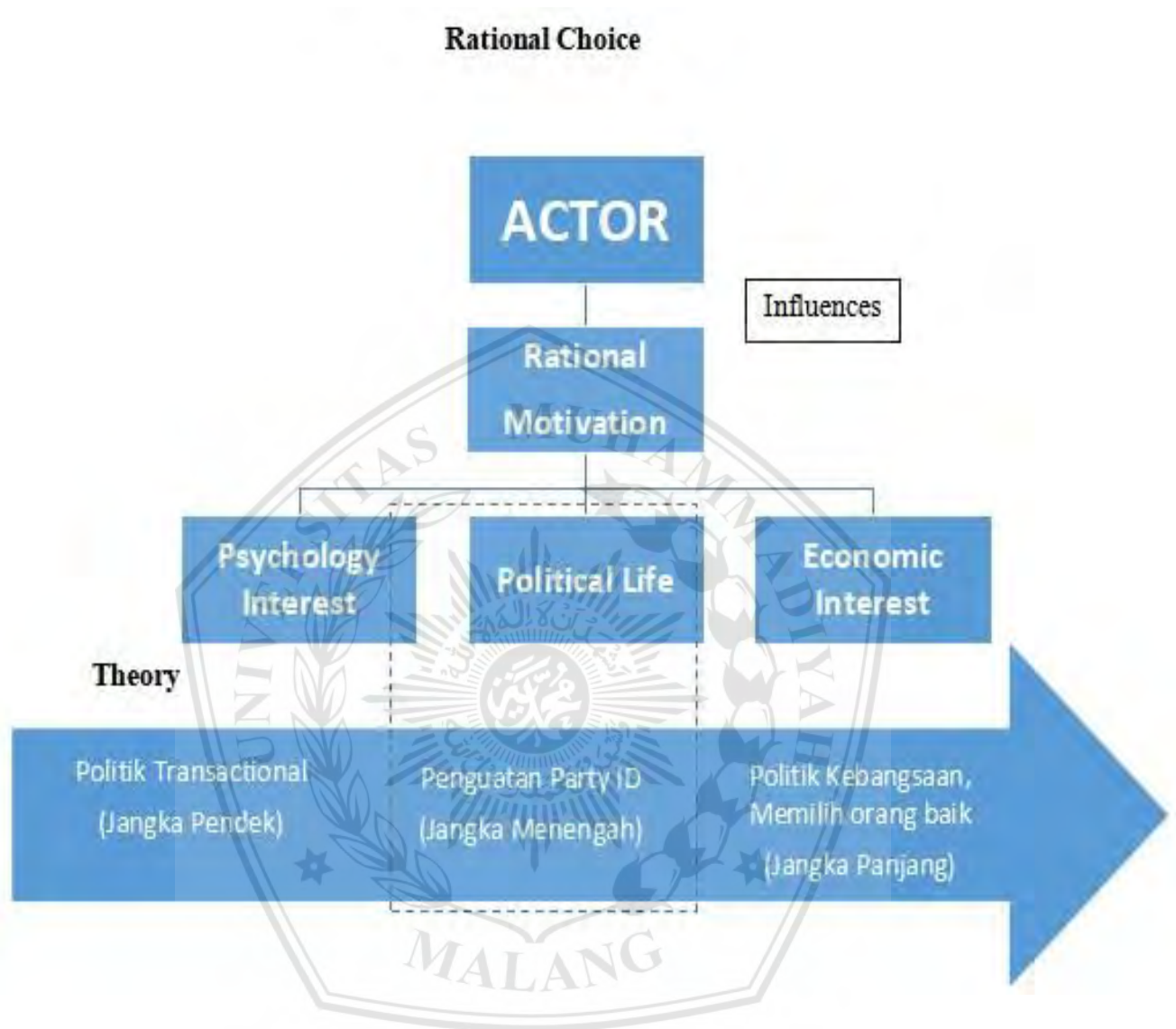
Lampiran 2 : Bagan Model Rasional Pembuatan Keputusan



Lampiran 3: Bagan Partai NasDem sebagai Aktor Rasional



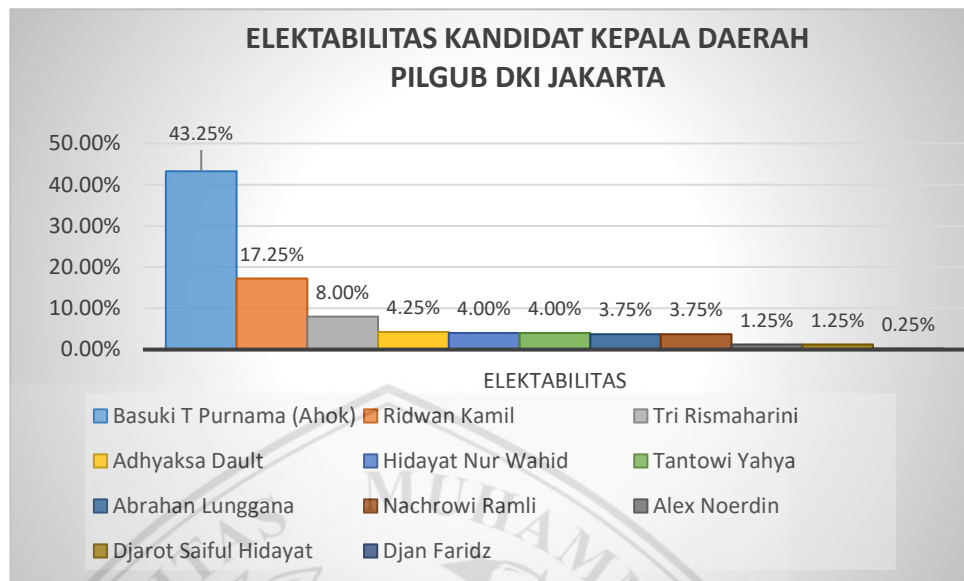
Lampiran 4 : Bagan Teoritik Pilihan Rasional dalam Analisa Keputusan Partai NasDem



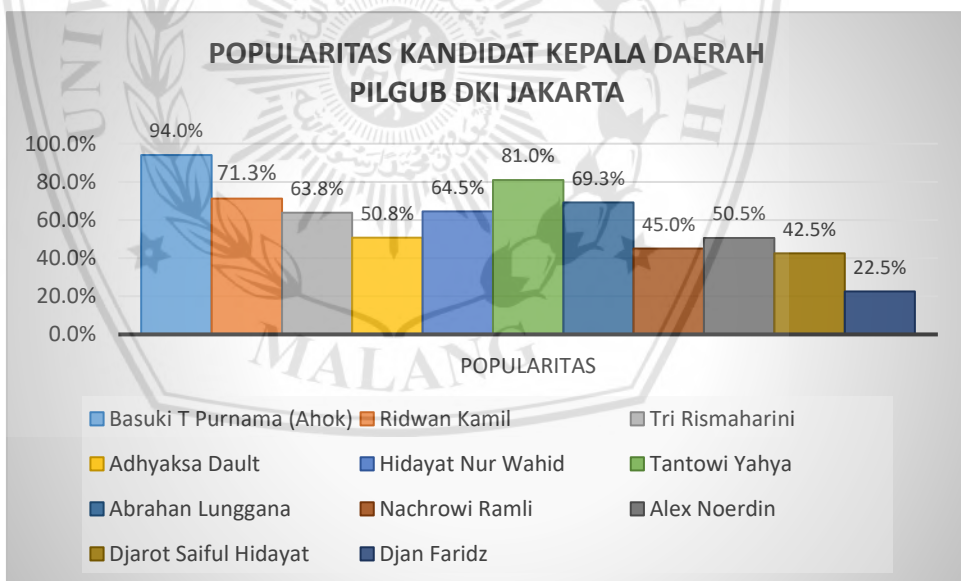
Lampiran 5 : Bagan Mekanisme Pengambilan Keputusan Internal Partai NasDem



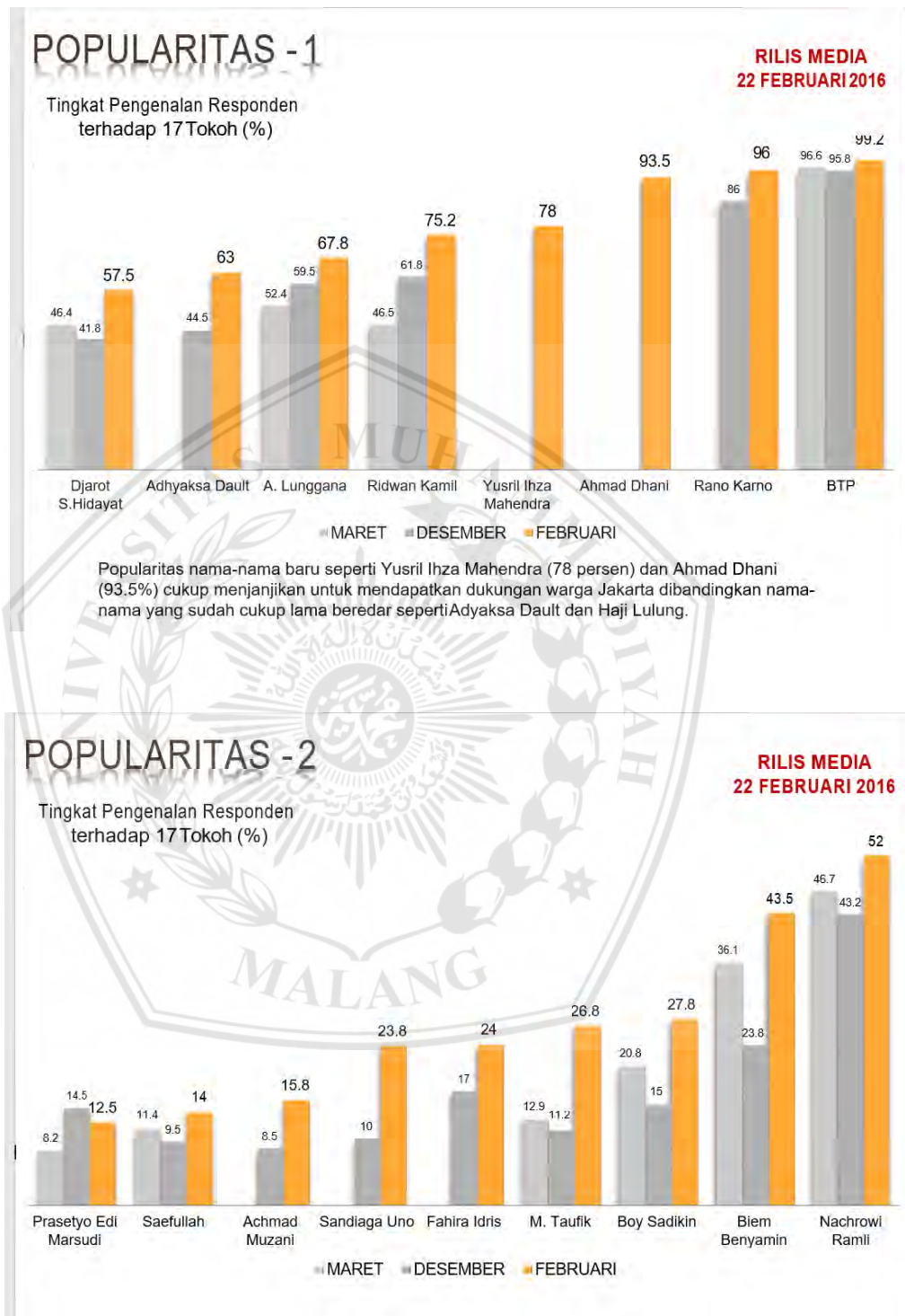
Lampiran 6 : Tabel Survey Elektabilitas Kandidat Pilgub DKI Jakarta 2017 - CSIS



Lampiran 7 : Tabel Survey Popularitas Kandidat Pilgub DKI Jakarta 2017- CSIS



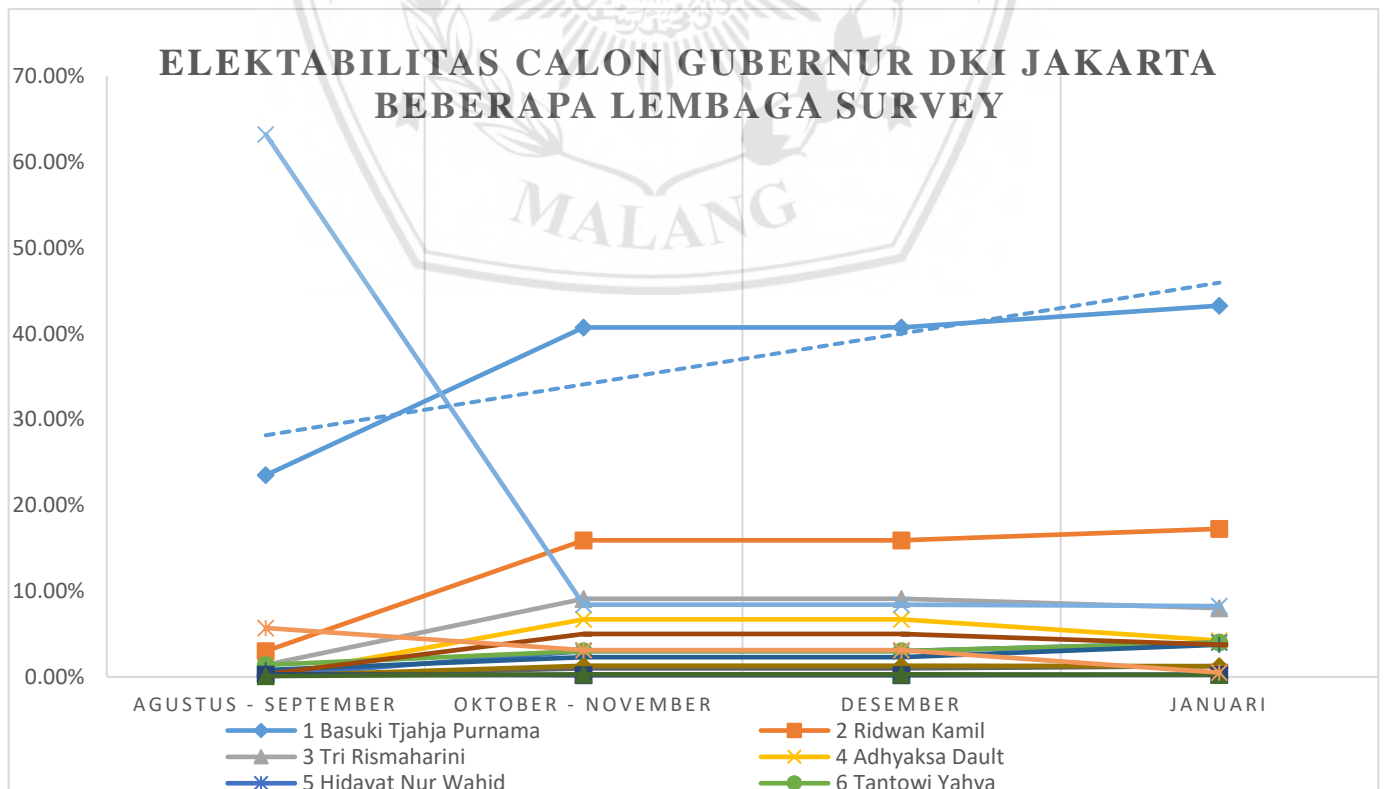
Lampiran 8 : Tabel Tingkat Pengenalan Responden Terhadap 17 Kandidat



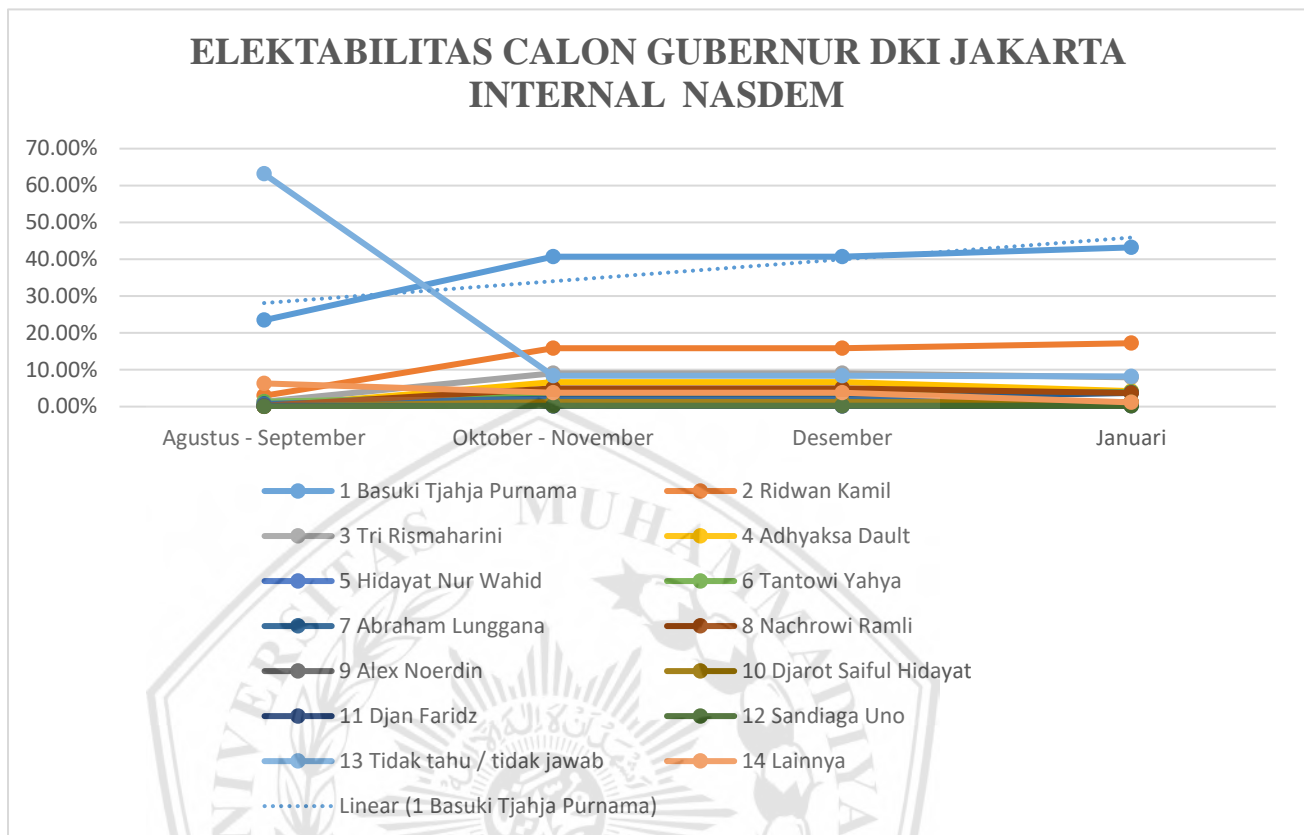
Keterangan: Tampilan data tabel terbagi menjadi dua.

Lampiran 9 : Tabel dan Grafik Hasil Survey Elektabilitas - Beberapa Lembaga Survey

No	Nama	2016			
		Agustus - September	Oktober - November	Desember	Januari
1	Basuki Tjahja Purnama	23,50%	40,70%	40,70%	43,25%
2	Ridwan Kamil	3,00%	15,90%	15,90%	17,25%
3	Tri Rismaharini	1,40%	9,10%	9,10%	8,00%
4	Adhyaksa Dault	0,00%	6,70%	6,70%	4,25%
5	Hidayat Nur Wahid	0,10%	3,00%	3,00%	4,00%
6	Tantowi Yahya	1,40%	3,00%	3,00%	4,00%
7	Abraham Lunggana	0,80%	2,30%	2,30%	3,75%
8	Nachrowi Ramli	0,30%	5,00%	5,00%	3,75%
9	Alex Noerdin	0,10%	1,00%	1,00%	1,25%
10	Djarot Saiful Hidayat	0,10%	1,30%	1,30%	1,25%
11	Djan Faridz	0,30%	0,20%	0,20%	0,25%
12	Sandiaga Uno	0,10%	0,30%	0,30%	0,25%
13	Tidak tahu / tidak jawab	63,20%	8,40%	8,40%	8,25%
14	Lainnya	5,70%	3,10%	3,10%	0,50%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		SMRC	Cyrus Network	Populi Center	CSIS



Lampiran 10 : Grafik Hasil Survey Internal Partai NasDem



Sumber: Fraksi NasDem DPR RI 2014-2019